



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM TERHADAP FEKTIVITAS
PENERIMAAN RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IRWAN SURYA WIBAWA

NIM. 500703535

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

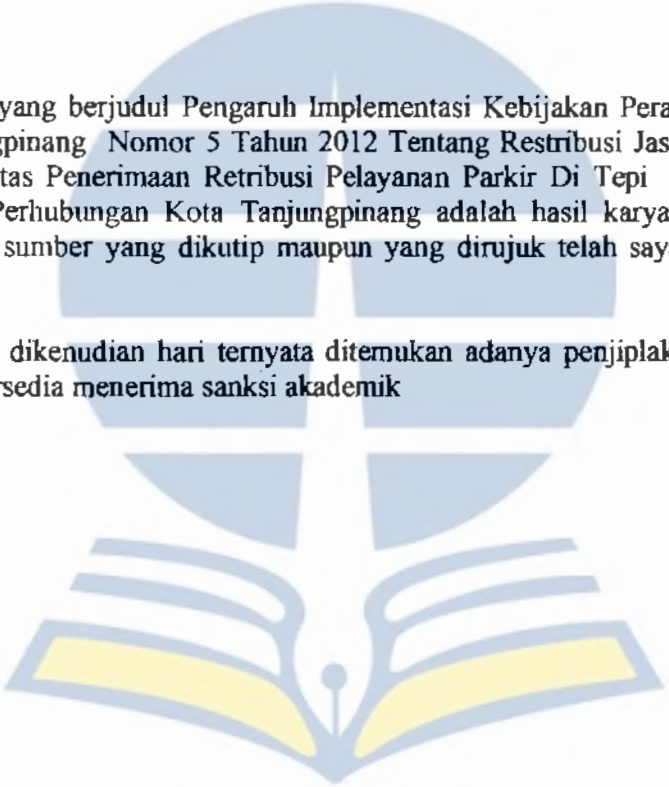
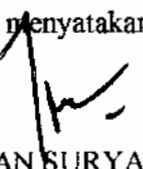
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikedudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Batam, Mei 2018

menyatakan


 
AN SURYA WIBAWA
NIM.500703535

ABSTRAK
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RESTRIBUSI JASA UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Irwan Surya Wibawa
irwan.swibawa@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Masalah dalam penelitian ini apakah ada pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?. Teori yang digunakan untuk implementasi kebijakan publik adalah teori Edward III yang didalamnya menyangkut komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya sedangkan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir menggunakan teori Sidik dan Soewondo. Mengacu kepada teori Edward III maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Terdapat pengaruh positif antara implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Untuk menguji hipotesis itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan mengambil sensus. Kemudian, data ditabulasi dan dianalisis menggunakan analisis jalur dengan alat bantu komputasi SPSS versi 19.0 for Windows.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Artinya, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang selama ini dapat mewujudkan efektifitas penerimaan retribusi parkir.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hasil perhitungan nilai R² determinasi hasil analisis regresi di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi R-square sebesar 0,444 artinya 44.4 % artinya bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya dapat menerangkan atau menjelaskan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebesar 44.4%. Sedangkan sisanya sebesar 55.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya insentif, kepemimpinan, pengawasan dan lain-lain.

Kata kunci : implementasi kebijakan dan efektivitas penerimaan retribusi.

ABSTRACT
INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION
POLICIES TANJUNGPINANG CITY NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING RESTIBUTION OF PUBLIC SERVICES ON THE
EFFECTIVENESS OF ACCEPTANCE OF PARKING SERVICES IN THE
ROAD OF PUBLIC STREET IN TRANSPORTATION SERVICE OF
TANJUNGPINANG CITY
 Irwan Surya Wibawa
irwan.swibawa@gmail.com

The purpose of this study was to uncover and analyze the effect of the implementation of Tanjungpinang City Regulation No. 5 of 2012 concerning Public Service Restitution on the Effectiveness of Receiving Public Road Parking Service Levies at the Transportation Office of Tanjungpinang City. The problem in this study is whether there is an effect of Tanjungpinang City Local Regulation Policy Number 5 of 2012 concerning Public Service Restitution on the Effectiveness of Public Road Parking Service Levy Revenue at the Tanjungpinang City Transportation Service ?. The theory used for the implementation of public policy is the theory of Edward III which includes communication, disposition, bureaucratic structure and resources while the Effectiveness of Parking Retribution Receipts uses Sidik and Soewondo theory. Referring to the theory of Edward III, this research hypothesis is formulated as follows: There is a positive influence between the implementation of Tanjungpinang City Regulation No. 5 of 2012 concerning Public Service Restitution on the Effectiveness of Public Road Parking Service Levy in the Tanjungpinang City Transportation Agency. To test the hypothesis, the research method used is a survey method by taking a census. Then, the data is tabulated and analyzed using path analysis with SPSS computation tool version 19.0 for Windows.

Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 which is translated into the dimensions of communication, disposition, bureaucracy and resources influences the effectiveness of receipt of Public Road Parking Service Levies at the Department of Transportation of Tanjungpinang City. That is, the Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 which is implemented in the receipt of Public Road Parking Service Levies at the Transportation Service of Tanjungpinang City has been able to realize the effectiveness of receiving parking fees.

Furthermore, if it is associated with the results of the calculation of the R² value of the determination of the regression analysis above, it is obtained the R.square determination coefficient number of 0.444 meaning 44.4% means that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 with the dimensions of communication, disposition, bureaucracy and resources can explain or explain the effectiveness of the receipt of Public Road Parking Service Levies at the Tanjungpinang City Transportation Agency is 44.4%. While the remaining 55.6% is explained by the residual variables or other variables not examined (epsilon) in this study, for example incentives, leadership, supervision and others.

Keywords: policy implementation and effectiveness of receipt of retribution.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi
Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Restribusi
Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang

Penyusun TAPM : Irwan Surya Wibawa
NIM : 500703535
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Menyetujui

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Tuswoyo, M.Si
NIP. 19620808 198910 1 001

Prof. Dr. HM. Anies Djaenuri, M.A
NIP. 19470401 196805 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A
NIP. 19720710 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan
Politik dan Mengelola Program Magister
Administrasi Publik pada Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Kepala Pusat Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Program Pascasarjana
pada Lembaga Pengembangan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19561027 198603 1 003

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

PENGESAHAN

Nama : Irwan Surya Wibawa
NIM : 500703535
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa
Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Restribusi Parkir Di
Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 28 April 2018
Waktu : 13.30 s/d 14:30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Eliaki Gulo, SE, MM

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A

Pembimbing I

Nama : Prof. Dr. HM. Anies Djaenuri, M.A

Pembimbing II

Nama : DR. Tuswoyo, M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tertuju pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Jakarta.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, antara lain kepada :

1. DR.Liestyodono Bawono Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Bapak Eliaki Gulo, SE,MM selaku Kepala UPBJJ-UT Batam penyelenggara Program Pascasarjana sekaligus Ketua Komisi Penguji
3. Bapak Prof.DR.HM.Aries Djaenuri,MA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah mengarahkan dan banyak memberikan bekal ilmu serta inspirasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Tuswoyo, M,Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

5. Seluruh Tutor Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta yang telah berkenan mentransfer dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staff karyawan Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sering berbagi wacana dengan penulis.
8. Rekan-rekan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang telah banyak membantu dalam segala hal untuk penyelesaian TAPM ini.
9. Rekan-rekan di Bappelitbang Kota Tanjungpinang yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Sahabat yang membantu menyumbangkan pikiran dan saran.
11. Ibunda tercinta Lisje Kresnowati, yang selalu memberikan dukungan moril dan juga do'a tiada hentinya untuk penulis.
12. Istriku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, serta anak-anakku tersayang.

Akhirnya, semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membawa manfaat untuk pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan khususnya di Kota Tanjungpinang. Amin.

Batam, Februari 2018
Penulis

Irwan Surya Wibawa

Riwayat Hidup

Nama : IRWAN SURYA WIBAWA
NIM : 500703535
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tgl Lahir : Malang / 18 Februari 1974

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di SDN 007 Pagi Pondok Labu Jaksel tahun 1986
2. Lulus SMP di SMPN 85 Pondok Labu Jakarta Selatan Tahun 1989
3. Lulus SMA di SMAN 34 Pondok Labu Jakarta Selatan Tahun 1992
4. Lulus S1 Ekonomi di Universitas Pancasila Tahun 2000

Riwayat Pekerjaan

1. Tahun 2010 s/d 2013 sebagai Kasi Pengawasan Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bintan.
2. Tahun 2013 s/d 2014 sebagai Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Kabupaten Bintan.
3. Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kasubbid Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha pada Bappelitbang Kota Tanjungpinang.

Batam, Mei 2018

IRWAN SURYA WIBAWA
NIM.500703535

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori Implementasi Kebijakan Publik	13
1. Dimensi Komunikasi.....	22
2. Dimensi Disposisi.....	23
3. Dimensi Struktur Birokrasi.....	24
4. Dimensi Sumber Daya.....	26
C. Landasan teori Efektivitas Penerimaan Restribusi Pelayanan Parkir	27
D. Kerangka Berpikir Penelitian.....	39
E. Hipotesis.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 41

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
D. Identifikasi dan Operasional Variabel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Jenis dan SumberData	48
G. Uji Validitas.....	49
H. Analisis Reliabilitas Kuesioner	50
I. Metode Analisis Data.....	51
J. Uji Hipotesis.....	55
K. Methods Successive Interval (MSI)	59
L. Jadwal Penelitian.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Objek Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian.....	64
1. Karakteristik Responden.....	64
2. Hasil Analisis Validitas Variabel Implementasi Kebijakan	67
3. Hasil Analisis Validitas Variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir	68
4. Hasil Analisis Pengujian Reliabilitas Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir (X) dan efektifitas retribusi parkir.....	69
5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
6. Analisis Regresi untuk mengetahui pengaruh implementasi perda terhadap efektifitas retribusi parkir.....	76
7. Uji Hipotesis.....	83
8. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	85
9. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	86
10. Pengujian regresi untuk masing-masing dimensi yang berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan retribusi parkir...	92

C. Pembahasan Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan melalui dimensi Komunikasi, birokrasi, disposisi dan sumber daya terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

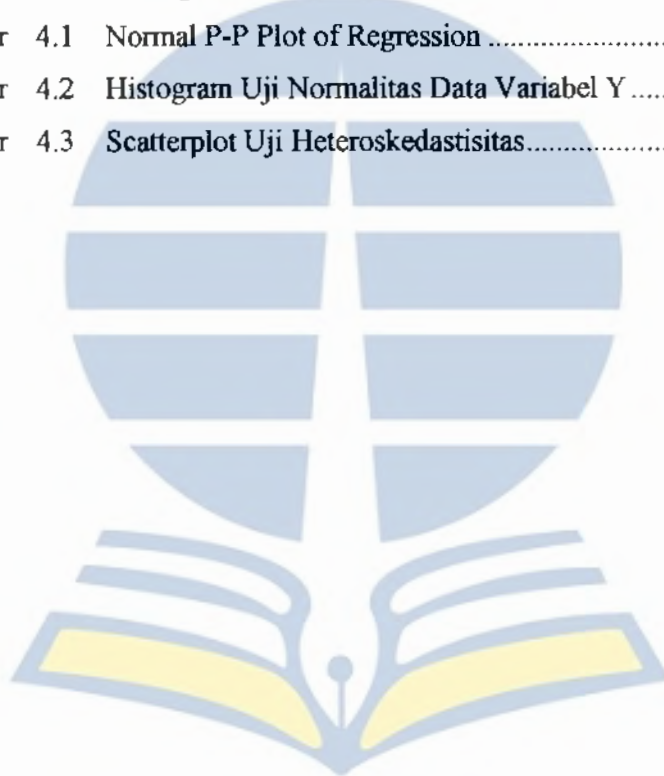
Tabel. 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016	5
Tabel. 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2016	6
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Parkir dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir	46
Tabel 3.2	Skala Pengukuran (Skala Likert).....	48
Tabel 3.3	Kriteria Standar Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian..	50
Tabel 3.4	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	60
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Petugas Parkir Kota Tanjungpinang.....	65
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	66
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir(X).....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Retribusi Parkir (Y).....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan dan Retribusi Parkir (X).....	69
Tabel 4.8	Kriteria Tanggapan Responden.....	71
Tabel 4.9	Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir	71
Tabel 4.10	Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Efektivitas Retribusi Parkir	75
Tabel 4.11	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	77
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	81

Tabel 4.13	Uji Autokorelasi Variabel X terhadap Variabel Y	82
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	83
Tabel 4.15	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
Tabel 4.16	Hasil Uji F	90
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda terhadap 4 Dimensi.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan Goerge Edward III (1980: 241).....	22
Gambar 2.2	Tiga Pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi Gibson dkk. (2004 : 26).....	31
Gambar 2.3	Sumber Efektivitas Gibson dkk. (2004 : 27).....	32
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	39
Gambar 4.1	Normal P-P Plot of Regression	78
Gambar 4.2	Histogram Uji Normalitas Data Variabel Y	79
Gambar 4.3	Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini merupakan amanat penting yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai esensinya, dalam konteks pemerintahan dituntut pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Untuk mewujudkannya perlu dilaksanakan pembangunan yang merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bukan saja diukur dari indikator ekonomi tetapi juga kemajuan non ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Namun dalam pengertian ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain perkembangan pendapatan perkapita juga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien demi meningkatkan produksi secara keseluruhan.

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang

lebih baik. Salah satunya adalah munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Munculnya tuntutan daerah tersebut mesti diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan lebih arif dan bijaksana, terutama dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan. Salah satu bentuk apresiasi pemerintah saat ini adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan pemberdayaan daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan kewenangan bidang keuangan dan pendanaan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 2001 yaitu tentang Pembentukan Daerah Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dengan daerah membawa angin segar bagi Kota Tanjungpinang untuk lebih berkonsentrasi memanfaatkan segala potensi daerah yang ada guna mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Sejak digulirkan sekitar enam belas tahun lalu, nuansa otonomi Kota Tanjungpinang telah memberikan jawaban atas keterbatasan dan kemampuan pusat dalam menjangkau wilayah Kota Tanjungpinang yang ada di Kepulauan Riau ini. Sehingga, rentang kendali pembangunan daerah bisa

berlangsung lebih pendek dan lebih mudah. Penyerahan wewenang pengelolaan pembangunan oleh pusat kepada daerah disambut baik dengan melakukan penyesuaian melalui ciri, model dan potensi daerah masing-masing serta disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah tersebut harus dibarengi dengan persiapan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber keuangan melalui usaha optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah, sebagaimana Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah,

namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah

Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sedangkan didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terdiri dari

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- e) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- f) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- g) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
- h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan umum. Potensi pendapatan pada retribusi parkir di tepi jalan umum yang dimiliki Kota Tanjungpinang cukup besar. Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2012 ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Perda ini mengatur perubahan tarif parkir kendaraan bermotor sehingga diharapkan target retribusi dapat terpenuhi.

Namun pada kenyataannya sejak diterapkannya Peraturan Daerah ini, Realisasi Penerimaan Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tanjungpinang hanya tercapai pada tahun 2012 hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Saldo
2012	316.800.000	353.830.500	111,69	37.030.500
2013	450.000.000	384.625.000	85,47	-65.375.000
2014	600.000.000	406.809.000	67,80	-193.191.000
2015	750.000.000	436.952.900	58,26	-313.047.100
2016	1.350.000.000	955.267.500	70,76	-394.732.500

Sumber data : Dinas Perhubungan Daerah Kota Tanjungpinang 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat hanya pada 2012 yang mencapai target sebesar 111,69 % dari target Rp.316.800.000,- terealisasi sebesar Rp.353.830.500, sedangkan pada tahun 2013 hanya tercapai 85,47 % dari target Rp.450.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.384.625.000, pada tahun 2014 hanya tercapai 67,80 % dari target Rp.600.000.000,- hanya terealisasi sebesar

Rp.406.809.000,-, pada tahun 2015 hanya tercapai 58,26 % dari target Rp.750.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.436.952.900,-, pada tahun 2016 hanya tercapai 70,76 % dari target Rp.1.350.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.955.267.500,-

Penyebab menurunnya target penerimaan retribusi pelayanan parkir dimaksud diduga bahwa implementor kebijakan atau pelaksana Peraturan Daerah di lapangan belum memiliki sikap yang sama terhadap isi kebijakan itu sendiri. Misalnya, penentuan target retribusi yang ditetapkan belum semua implementor memiliki persepsi yang sama bahwa besaran target itu tidak ada kesepakatan bersama.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016	Perubahan Pertumbuhan
[1]	[2]	[3]	[4]
Tanjungpinang	5.69	5.08	-0.61
Batam	6.83	5.45	-1.38
Anambas	5.59	6.81	1.22
Lingga	2.38	4.07	1.69
Bintan	5.16	5.96	0.8
Karimun	6.54	6.18	-0.36
Natuna	5.83	6.09	0.26
Kepri	6.01	5.03	-0.98

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi kota tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 5.69 persen dan melambat sekitar 0.61 poin menjadi 5.08 persen pada tahun 2016.

Kota Tanjungpinang termasuk kedalam Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berada di urutan kedua kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Selain alasan realisasi target retribusi yang selalu tidak memenuhi target yang sudah ditentukan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan besarnya perlambatan ekonomi di Kota Tanjungpinang yang cukup signifikan merupakan alasan yang sangat kuat untuk memilih lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang.

Dari uraian singkat diatas, maka penulis akan mengambil penelitian ini dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah diatas, studi ini difokuskan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian (research question) yaitu

1. Apakah ada hubungan/pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya hubungan antara Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, maksud dari penelitian ini adalah untuk

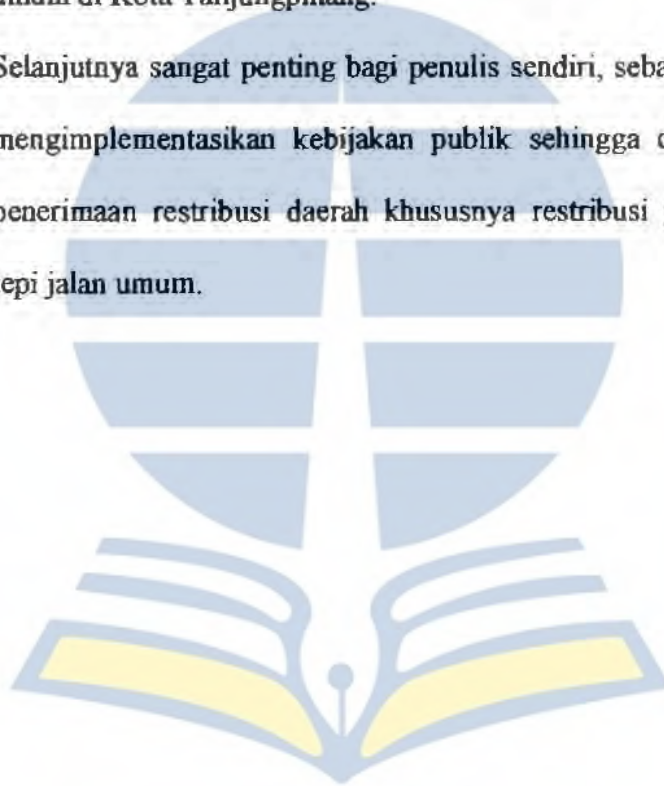
1. Untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adanya hubungan antara Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berguna oleh berbagai pihak yang terkait antara lain:

1. Kegunaan dalam pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam Penerimaan Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- b. Sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya berkenaan dengan implementasi kebijakan dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Kegunaan dalam praktek, meliputi hal-hal sebagai berikut.
- a. Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Tanjungpinang.
 - b. Selanjutnya sangat penting bagi penulis sendiri, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan publik sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Ketika merencanakan kebijakan wilayah retail, harus memperhatikan berbagai isu dan keadaan di wilayah sekitar, salah satu isu yang harus diperhatikan yaitu mengenai masalah perparkiran. Birokrasi melalui pemerintah daerah harus bertanggungjawab dalam menyediakan tempat perparkiran termasuk didalamnya sumber daya pengelola perparkiran tersebut. (Moiseeva dan Timmermans, 2010). Pemilihan pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas perparkiran diantaranya yaitu karakteristik dari pengelola perparkiran (Still and Simmons, 2000).

Menurut Anggraeni (2014), ada hubungan antara implementasi kebijakan dengan efektifitas dan kualitas terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian Anderson dan Zbirinko (2014) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh secara positif terhadap efisiensi dan produktifitas pelayanan publik disuatu instansi pemerintah. Hasil penelitian minggardo (2016), ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi perparkiran di suatu wilayah diantaranya yaitu birokrasi dari pemerintah, penyerahan tugas atau disposisi mengenai prosedur perparkiran, variabel perparkiran yang terdiri dari kapasitas parking, rata-rata tarif per jam parkir, persentase parkir dipinggir jalan, karakteristik parkir, petugas perparkiran, persentase jualan, dan variabel karakteristik ekonomi dan demografi area disekitar tempat parkir yang terdiri dari kepadatan penduduk, tingkat derajat perkotaan dan rata-rata pendapatan penduduk

disekitar tempat parkir. Kemampuan petugas parkir yang meliputi kemampuan sumber daya dan komunikasi, dengan menggunakan analisis komponen utama dan analisis faktor berpengaruh secara signifikan terhadap output perparkiran disuatu wilayah. Pemerintah daerah yang menangani suatu wilayah harus setuju untuk meningkatkan kapisitas peroarkiran, dengan kata lain, birokrasi harus mendukung semua kebijakan yang berhubungan dengan perparkiran.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variabel		Alat analisis	Hasil penelitian
		Independen	Dependen		
Still, B., Simmonds, D. 2000	Parking restraint policy and urban vitality. Transport Reviews	Fasilitas perparkiran (karakteristik dari pengelola parkir)	Pemilihan Pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya	Regresi Berganda	Pemilihan pusat perbelanjaan dipengaruhi oleh fasilitas perparkiran diantaranya yaitu karakteristik dari pengelola perparkiran
Moiseeva dan Timerman, 2010	Imputing relevant information from multi-day GPS tracers for retail planning and management using data fusion and context-sensitive learning. Journal of Retailing and Consumer Services.	Birokrasi pemerintahan termasuk didalamnya sumber daya pengelola perparkiran	Kebijakan masalah retail khususnya mengenai Masalah perparkiran	Regresi Berganda	Birokrasi pemerintahan mempengaruhi masalah perparkiran

Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variabel		Alat analisis	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
Andersson and Zbirenko 2014	Effect of Organizational Structure, Leadership and Communication on Efficiency and Productivity	Struktur organisasi, kepemimpinan dan komunikasi	Efisiensi dan produktifitas pelayanan Publik	Regresi Berganda	komunikasi berpengaruh secara positif terhadap efisiensi dan produktifitas pelayanan publik disuatu instansi pemerintah
Anggraeni 2014	The Effect of Policy Implementation of Bureaucracy Reform and The Organizational Development to The Public Service Quality in the Ministry of Home Affairs	Implementasi kebijakan	Efektifitas dan kualitas pelayanan publik	Regresi Berganda	ada hubungan antara implementasi kebijakan dengan efektifitas dan kualitas terhadap pelayanan publik
Minggard o.2016	Articles on Parking Policy.	Birokrasi pemerintah, penyerahan tugas atau disposisi mengenai prosedur perparkiran, variabel perparkiran yang terdiri dari kapasitas parking, rata-rata tarif per jam parkir, persentase parkir dipinggir jalan, karakteristik parkir, petugas	Efektifitas dan efisiensi perparkiran	Analisis komponen utama dan analisis faktor	kemampuan sumber daya dan komunikasi berpengaruh terhadap output perparkiran disuatu wilayah, birokrasi harus mendukung semua kebijakan yang berhubungan dengan perparkiran

		perparkiran, persentase jualan, dan variabel karakteristik ekonomi dan demografi area disekitar tempat parkir yang terdiri dari kepadatan penduduk, tingkat derajat perkotaan dan rata-rata pendapatan penduduk disekitar tempat parkir. Kemampuan petugas parkir yang meliputi kemampuan sumber daya dan komunikasi			
--	--	---	--	--	--

B. Landasan Teori Implementasi Kebijakan Publik

Jika dicermati sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tentu saja tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan (diterapkan), karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-

baiknya, tetapi jika pada tahapan pelaksanaannya tidak diperhatikan optimalisasi implementasinya, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa

dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Sementara itu Abdul Wahab (2008:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Begitu pentingnya tentang implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, akan tetapi harus juga jelas.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplemetasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah

diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya (*policy stakeholders*) serta lingkungan (*environment*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan (*policy environment*) yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.

Relevansinya dengan hal itu, Winarno Budi (2011:19) mengemukakan bahwa: implementasi kebijakan merupakan:

Suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu

ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sebagai pertimbangan awal dalam pra-kondisi implementasi kebijakan, maka kita juga perlu mencermati apa yang kemukakan oleh Abdul Wahab (2008:55) bahwa:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan, 2) Kebijakan tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi, 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan, 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum diantisipasi, 6) Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit ataupun implisit, 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, 8) Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intraorganisasi, 9) Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga-lembaga pemerintah walaupun tidak secara eksklusif, dan 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dari konsepsi diatas, dapat ditegaskan bahwa kebijakan publik yang siap diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran, dan seterusnya bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi untuk memperoleh umpan balik mengarah kepada perbaikan atau revisi kebijakan.

Olehnya itu dapat dikatakan pula bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan dengan baik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik sekaligus mendorong terciptanya partisipasi publik dalam pembangunan secara

luas. Oleh karena itulah, dalam aspek implementasi kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami : a) apa yang patut dan layak dilakukan serta apa tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dan implementor dalam tahapan implementasi kebijakan, b) apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan c) apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu pula, Nugroho (2003:115) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Kebijakan pada umumnya dirumuskan dengan strategi tersendiri yang menyangkut dengan pengambilan keputusan bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara dalam menjalankan misi pemerintah. Kebijakan biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan formal. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

Selanjutnya Subarsono (2005:12) mengemukakan bahwa :

“Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu”.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sebuah Implementasi kebijakan, menurut Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006 : xv) sangat tergantung pada :

Keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerjasama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui secara pasti siapa yang berkepentingan, bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu.

Dari pandangan diatas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementor atau pelaksana kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau aktor kebijakan tersebut dapat bertanggungjawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap kebijakan yang dibuatnya.

Disamping itu pula kita patut menyadari bahwa tercapai tidaknya misi dari sebuah produk kebijakan dalam proses implementasinya, juga tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari sebuah sistem. Tentang sistem itu sendiri menurut Winardi (2007:64) : “Sebagai suatu kumpulan keseluruhan elemen-elemen, yang saling berinteraksi dan menuju kearah pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Sebuah sistem dipastikan dikelilingi oleh lingkungannya”. Produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan pasti akan didukung dan dipengaruhi lingkungan sekitarnya sebagai sebuah sistem (sosial, ekonomi, politik, dan budaya). Dimana pada suatu saat kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksanya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh implementor kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan implementasi kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Oleh karena itulah, sebuah kebijakan yang tersusun dengan baik dan diimplementasikan terarah dalam suatu sistem yang baik, maka seharusnya memperhatikan hal-hal yang dikemukakan Winardi (2007:120), yakni: “a) memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian, b) bersifat konsisten dan tidak

memperhatikan hal-hal yang dikemukakan Winardi (2007:120), yakni: “a) memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian, b) bersifat konsisten dan tidak ada kebijakan yang saling bertentangan, c) harus sesuai dengan keadaan yang berkembang, d) membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta obyektif, serta e) sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.”

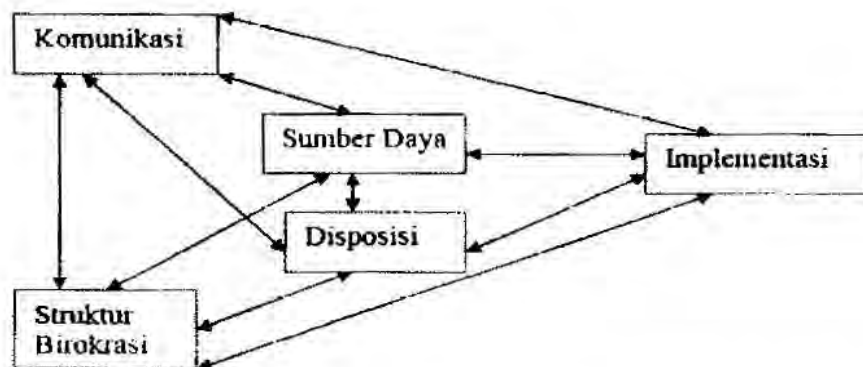
Dari pandangan tersebut setidaknya dapat dipahami bahwa lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu pemaknaan yang pluralistik dalam sistem lingkungan yang lebih makro maupun mikro. Hal ini dapat meliputi: *Pertama*, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. *Kedua*, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia. *Ketiga*, lingkungan khusus yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan publik, antara lain: karakteristik geografis, seperti sumber alam, iklim dan topografi; variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokasi; budaya dan krisis politik; sistem sosial; serta sistem ekonomi, pengangguran, kriminalitas.

Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu sendiri. Abdul Wahab (2008 : 10) mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting

daripada pembuatan kebijakan itu sendiri". Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik.

Karena itu, diantara model-model kebijakan yang dikemukakan para ahli di atas, maka teori implementasi kebijakan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan George C. Edward III. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edward III adalah ada kecocokan dengan fenomena yang terjadi dilapangan khususnya di objek penelitian dimana sikap para implementor belum memiliki sikap yang sama terhadap penetapan target retribusi parkir yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga menyulitkan mereka untuk mengejar target tersebut.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Edward III bahwa, "sampai saat ini telah difokuskan pengaruh langsung berbagai faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan. Semua faktor itu bekerja dan mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan, baik secara langsung, tidak langsung dan berinteraksi secara simultan. Dengan kata lain, komunikasi mempengaruhi sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi".



Gambar 2.1 : Model Implementasi Kebijakan Goerge Edward III (1980: 241)

Lebih jelasnya model implementasi kebijakan menurut Goerge Edward III akan diuraikan lebih lanjut.

1. Dimensi Komunikasi

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi (*Communication*). Sebab, pelaksanaan (implementasi) kebijakan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik akan gagal. Komunikasi Goerge Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision-makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan

yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: (a). *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. (b). *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. (c). *Konsistensi*, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Dimensi Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakana publik juga tergantung kepada disposisi (*Disposition*). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilaksanakan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal – hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

- a. *Pengangkatan birokrat*, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*) atau organisasi.

3. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik sebab, struktur yang berbelit-belit dan tidak diimbangi

dengan tupoksi yang jelas akan menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksanakebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau masih terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik. *Pertama*, adalah melakukan *Standard Operating Prosedures* (SOPs) *kedua*, melaksanakan fragmentasi (*fragmentation*). SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi (*fragmentation*) adalah upaya penyebaran tanggungjawab sebuah kebijakan kedalam kegiatan-kegiatan unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. Sehingga apa yang dikatakan Max Weber dalam Albrow, Agustino Leo. (2006 331) merupakan mekanisme formal dengan model ideal type.

4. Dimensi Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan adalah tersedianya sumberdaya manusia. Sumberdaya (*Resources*). Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu: (a). *Staf*, sumberdaya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf/pegawai atau lebih tepatnya street-level ureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan ketidakberhasilan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. (b). *Informasi*, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. (c). *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. (d). *Fasilitas*, fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

C. Landasan Teori Efektivitas *Penerimaan Restribusi Pelayanan Parkir*

Jika ditelusuri asal kata efektivitas berasal dari kata *efektif* artinya berhasil atau mencapai sasaran. Dalam Eksiklopedi Administrasi (1982 : 108), efektivitas itu merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Sedangkan Huseini (2007 : 54-56) menjelaskan tentang efektivitas organisasi yaitu “ bahwa efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas merupakan suatu konsep yang luas

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi”. Efektivitas organisasi merupakan sebuah konsep yang lebih terbatas, dan menyangkut proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi. Efektivitas menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output.

Untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi ada beberapa pendekatan yang dapat dipahami. Menurut Griffin (2003:88) terdapat 4 (empat) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan sumber daya manusia (*system resources approach*) yaitu efektivitas organisasi yang berfokus kepada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukannya. Artinya, organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat memperoleh bahan bahan baku ketika terjadi kelangkaan.
- b. Pendekatan proses internal (*internal process approach*) yaitu proses meminimalisasi ketegangan dalam organisasi dan mengintegrasikan individu dalam organisasi sehingga operasi organisasi berjalan dengan lancar.
- c. Pendekatan tujuan (*goal approach*) yaitu berfokus kepada tingkat di mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi maka dikatakan efektif.
- d. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) menurut pandangan ini sejauhmana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok.

Kemudian Huseimi (2007 : 54-56) mengatakan:

Pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya adalah pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil), yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output (hasil/realisasi) dengan yang direncanakan (ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka organisasi semakin memiliki efektivitas.

Selanjutnya, jika membahas pengertian efektivitas sebagaimana diungkapkan Bernard yang dikutip oleh Gibson dkk (2004 : 27) menyatakan bahwa, "yang diartikan dengan efektivitas ... adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas".

Jika mencermati pendapat para ahli di atas maka pendekatan yang digunakan untuk memahami efektivitas pemungutan pajak reklame adalah menggunakan pendekatan tujuan (*goal approach*), dimana Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target perolehan pajak reklame setiap tahun sebagai tujuan (*goal*) keberadaan lembaga tersebut. Keberadaan lembaga ini tujuannya adalah untuk menarik pajak dari publik untuk membiaya pembangunan fisik maupun non fisik.

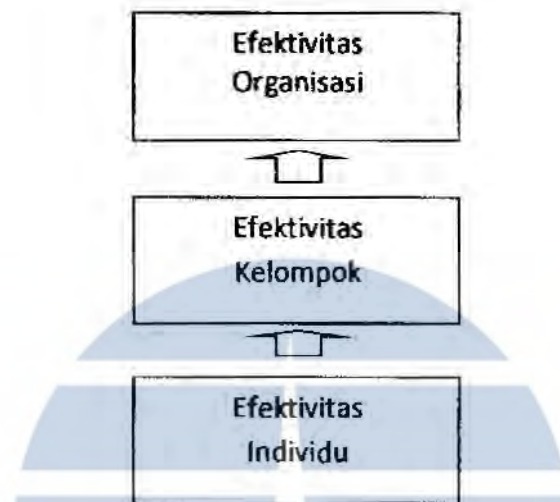
Semakin besar pajak reklame yang dihimpun semakin efektif organisasi yang bersangkutan. Karena itu pendekatan tujuan sangat tepat untuk memahami

efektivitas organisasi. Digunakannya pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas organisasi karena di dalamnya ada target yang harus dicapai oleh organisasi (lembaga). Oleh karena itu menurut Griffin (2003:89) mengatakan "jika mereka memilih target yang salah atau jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan menjadi kurang efektif mencapai sasaran".

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan (*goal*) suatu organisasi tidak terlepas dari efektivitas individu, kelompok dan organisasi, sebagaimana dikemukakan Gibson, dkk (2004 : 25) yaitu :

1. Efektivitas individu yang menekankan pada : a) Hasil karya pegawai atau anggota tertentu dari organisasi, dan b) Prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi.
2. Efektivitas kelompok yang menekankan pada : a) Bekerja secara bersama-sama dalam kelompok, dan b) Hasil yang dicapai jumlah kontribusi dari semua anggotanya.
3. Efektivitas organisasi, terdiri dari individu dan kelompok, yang menekankan pada hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

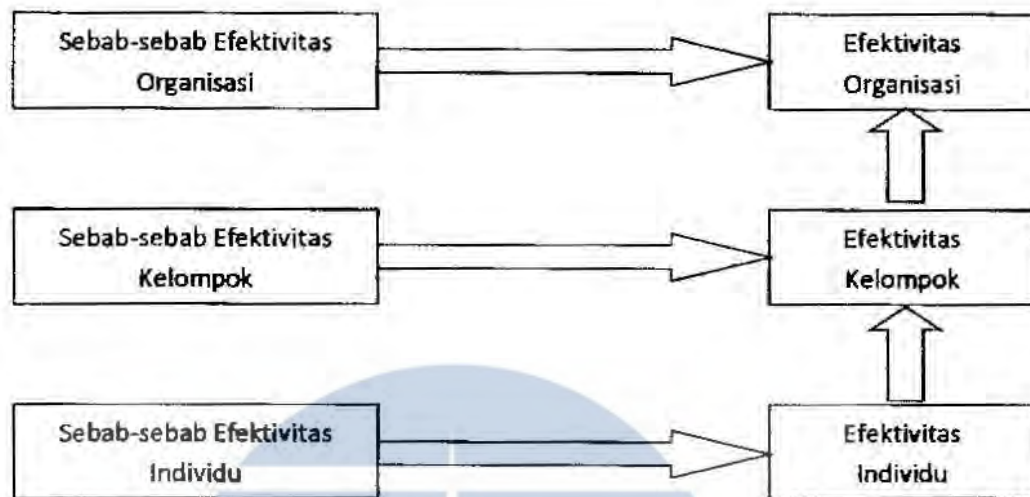
Hubungan ketiga pandangan mengenai efektivitas itu dapat disajikan pada gambar berikut..



Gambar 2.2. : Tiga Pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi.
Sumber : Gibson dkk. (2004 : 26)

Anak panah yang menghubungkan tiap-tiap tingkat tidak menunjukkan bentuk khusus dari hubungan tersebut. Karena, efektivitas individu tidaklah harus merupakan sebab dari efektivitas kelompok, begitu pula tidak dapat dikatakan bahwa efektivitas kelompok adalah jumlah dari efektivitas individu. Hubungan antara pandangan-pandangan tersebut berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor seperti jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menurut Gibson, dkk (2004 : 26), tugas utama dari manajemen adalah mengetahui sebab yang meningkatkan efektivitas organisasi, kelompok dan individu, seperti dijelaskan dalam Gambar berikut ini:



Gambar 2.3. : Sumber Efektivitas
 Sumber : Gibson dkk. (2004 : 27)

Gambar 2.3. di atas dapat dijelaskan sebab-sebab tidak tercapainya efektivitas individu, kelompok dan organisasi yaitu :

1. Sebab-sebab efektivitas individu adalah ciri fisik, sifat psikologis dan motivasi yang menyebabkan perbedaan dalam prestasi kerja di antara individu.
2. Sebab-sebab efektivitas kelompok meliputi kepemimpinan kelompok, komunikasi dan sosialisasi.
3. Sebab-sebab efektivitas organisasi, yaitu hasil dari jumlah besar variabel termasuk teknologi, hambatan lingkungan dan kesempatan baik serta kecakapan perseorangan dan motivasi.

Dari beberapa pandangan di atas, untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan uraian di atas, Siagian (2006 : 29) mengemukakan pendapatnya tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, antara lain :

1. Suasana kerja yang memungkinkan berkembangnya daya kreativitas setiap orang dalam organisasi.
2. Suasana kerja yang merangsang timbulnya perasaan sepenanggungan dan seperasaan.
3. Situasi lingkungan intern di mana jiwa anggota-anggota suatu keluarga besar selalu diusahakan agar berkembang.
4. Kondisi pekerjaan secara fisik menyenangkan, tempat bekerja tidak menyakkan nafas, ventilasi cukup, tata ruang yang rapih dan bersih, fasilitas kerja yang memadai dan sejenisnya.
5. Terciptanya iklim mempercayai dan bukan saling mencurigai.
6. Adanya kesepakatan mengembangkan kemampuan karyawan secara sistematis dan berencana yang dikaitkan dengan pengembangan karier dan digunakan sebagai wahana untuk mempersiapkan karyawan dalam proses memikul tanggungjawab yang lebih besar dikemudian hari.
7. Pengikutsertaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

Jika dikaitkan dengan efektivitas pemungutan retribusi dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, sasaran akhir utama perpajakan tersebut adalah penerimaan pajak yang direncanakan, atau efektifitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target) penerimaan yang direncanakan.

Jika dicermati dalam pengertian efektivitas di atas tentu saja terdapat upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, demikian pula dalam pengertian efektivitas penerimaan retribusi Daerah, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah keberhasilan organisasi Dipenda dalam mengelola pendapatan di bidang retribusi Daerah.

Atas dasar pendekatan tersebut maka pengertian efektivitas penerimaan retribusi yaitu keberhasilan penerimaan retribusi Daerah yang dicapai atau diperoleh oleh masing-masing Dinas Pendapatan Daerah dalam setiap periode tahun penerimaan atau perolehan. Karena itu, mengukur efektivitas penerimaan retribusi Daerah yaitu melakukan perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai dari pungutan retribusi Daerah dalam setiap waktu atau periode yang ditetapkan. Periode yang dimaksud adalah laporan hasil pendapatan Daerah di bidang retribusi Daerah dari setiap Dinas Pendapatan.

Pendapatan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah retribusi yaitu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan dimana paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran itu (Mansury, 2006:41).

Retribusi merupakan penilaian- penilaian yang terdiri dari :

1. Penilaian kecukupan.

Pengenaan retribusi yang bervariasi, sehingga lebih berorientasi pada kecukupan biaya pelayanan yang diberikan biasanya mengabaikan kontribusinya kepada penerimaan pemerintah daerah.

2. Penilaian keadilan.

Dalam pemungutan harus bersifat seadil mungkin, misalnya pengenaan tarif yang berbeda atas dasar kelas-kelas pemakai tertentu.

3. Penilaian kemampuan administrasi,

Secara teoritis, retribusi mudah ditaksir dan dipungut karena pertanggungjawabannya didasarkan atas konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar.

4. Penilaian kesepakatan politik

Perlu adanya kesepakatan politik antara pemerintahan daerah dan DPRD dalam setiap upaya peningkatan retribusi (Dave KJ : 1988). Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah,

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.
3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Melakukan pemungutan retribusi bukanlah hal yang mudah, namun berbagai faktor yang bisa mempengaruhi retribusi parkir. Keterkaitan antara satu

faktor dengan faktor lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga membentuk suatu jalinan keterpaduan. Begitu pula upaya Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selain akan dipengaruhi oleh kualitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti penerapan komunikasi dan kepemimpinan juga akan dipengaruhi oleh faktor lain secara garis besarnya, menurut Rosadi (1997:74) ada dua faktor yaitu "faktor yang bersifat intangible dan faktor yang bersifat tangible". Menurut Devas, dkk (1989 : 144) terjadinya ketidakefektifan retribusi parkir bisa terjadi apabila (a) masyarakat mulai menghindari pajak (tax avoidance) (b) terjadinya kerjasama antara fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak mengurangi jumlah pajak terhutang (tax evasion) dan (c) penipuan pajak oleh fiskus (ia mengantongi sebagian dari penerimaan pajak).

Untuk membahas efektivitas pemungutan parkir menurut Griffin (2003:88) ada empat pendekatan yaitu: "(a). Pendekatan sumber daya manusia (system resources approach) (b). Pendekatan proses internal (internal process approach) (c). Pendekatan tujuan (goal approach) yaitu berfokus kepada tingkat di mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi maka dikatakan efektif; (d). Pendekatan konstituensi strategis (strategic constituencies approach) menurut pandangan ini sejauhmana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok Huseini (1987 : 54-56) juga mengatakan: "Pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya adalah pendekatan sasaran (goal approach) dimana dalam pengukuran

efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil), yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output (hasil/realisasi) dengan yang direncanakan (ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka organisasi semakin memiliki efektifitas”.

Mengacu kepada pendekatan di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk memahami efektifitas penerimaan restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah menggunakan pendekatan tujuan (goal approach), dimana Dinas Perhubungan telah menetapkan target perolehan restribusi parkir setiap tahun sebagai tujuan (goal) keberadaan lembaga tersebut. Keberadaan lembaga ini tujuannya adalah untuk menarik restribusi parkir dari publik untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik. Semakin besar restribusi parkir yang dihimpun semakin efektif organisasi yang bersangkutan. Digunakannya pendekatan tujuan untuk mengukur efektifitas organisasi karena di dalamnya ada target yang harus dicapai oleh organisasi (lembaga). Oleh karena itu menurut Griffm (2003:89) mengatakan ”jika mereka memilih target yang salah atau jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan menjadi kurang efektif mencapai sasarannya”.

Jika dikaitkan dengan efektifitas pemungutan restribusi parkir dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perparkiran untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, sasaran akhir utama perestribusiantersebut adalah penerimaan restribusi parkir yang direncanakan, atau efektifitas pemungutan restribusi parkir dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target) penerimaan yang

direncanakan. Karena itu indikator realisasi penerimaan mencakup hasil perolehan secara riil (nyata), penghambat perolehan retribusi, dan potensi retribusi parkir. Kemudian indikator target mencakup, kejelasan target, kejelasan waktu pencapaian, ketersediaan fasilitas mencapai target dan kesepakatan terhadap target

Dengan demikian jika mencermati uraian di atas jelas tampak efektivitas berkaitan dengan kuantitatif sebagaimana dikemukakan Danim (2004:119). Selanjutnya, dipertegas Panglaykim (1991:180) mengatakan bahwa “melakukan perbandingan antara apa yang diharapkan (target) dan apa yang dicapai (realisasi), dari hasil perbandingan ini dapat diketahui apakah organisasi efektif dan efisien”. Lebih jelasnya Sidik dan Soewondo (1996:65-76) membuat rumusan efektivitas pemungutan retribusi dengan mengacu kepada rumusan TPI (*Tax Performace Index*) yaitu:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

Berdasarkan rumusan di atas maka untuk mengukur efektivitas pemungutan per setiap mata pajak seperti pajak reklame maka dapat mengacu kepada rumus *Tax Performace Index* (TPI) sebagaimana dikemukakan Sidik dan Soewondo (1996:76), yaitu:

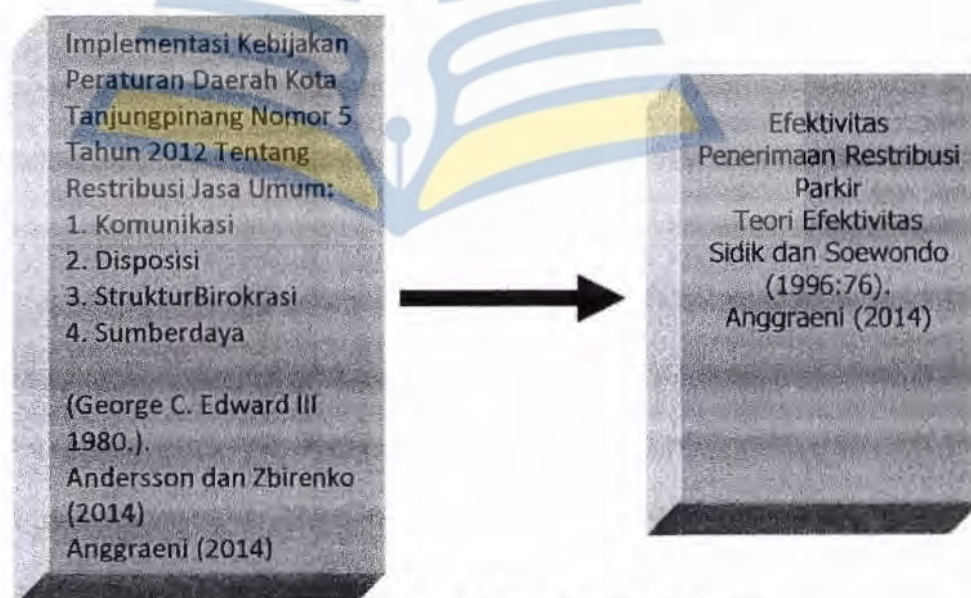
$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi}}{\text{Target Penerimaan Restribusi}} \times 100\%$$

Jika mengacu kepada uraian teori tentang efektivitas dan formula efektivitas pemungutan retribusi baik pemungutan retribusi parkir, maka teori efektivitas pemungutan retribusi parkir yang digunakan dalam penelitian ini

sebagai pisau analisis peneliti yaitu menggunakan teori yang dikemukakan Sidik dan Soewondo (1996:76). Pertimbangan menggunakan teori ini, pertama, teori ini telah mengacu kepada rumusan yang berlaku secara makro atau berlaku umum dalam mengukur efektivitas pemungutan retribusi parkir. Kedua, sesuai dengan fenomena yang ditemui dilapangan, yang menunjukkan bahwa pimpinan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang telah menetapkan dimensi target retribusi parkir selama beberapa tahun sebagai acuan untuk mengukur kinerja instansi tersebut, namun hasil (realisasinya) tidak mencapai target. Bahkan selama tahun 2013-2016 selalu tidak tercapai dari target, ini mencerminkan efektivitas pemungutan retribusi parkir masih rendah. Karena itu ada kecocokan menggunakan teori ini untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi parkir.

D. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan kajian teori di atas maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan kedalam kerangka berpikir sebagai berikut yaitu :



Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran Penelitian

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas, maka diajukan hipotesis penelitian untuk menjawab tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang.
2. Hipotesis 2: Komunikasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang.
3. Hipotesis 3: Disposisi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang.
4. Hipotesis 4: Struktur Birokrasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang.
5. Hipotesis 5: Sumber daya berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi: 1987:3). Penelitian survei yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan kuantitatif.

Penelitian deskriptif yang diawali dengan menggunakan tabel Frekwensi dimana setiap butir jawaban kuesioner yang telah dijawab oleh si responden kemudian ditabulasi lalu disimpulkan kedalam satu tabel frekwensi tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkannya dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007:260). Tujuannya untuk mengetahui secara umum bagaimana kondisi setiap variabel bebas yaitu implementasi kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Tanjungpinang. Demikian juga kondisi umum variabel tidak bebas yaitu efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir.

Jenis penelitian survei lainnya yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (S.Margono, 2010:105) Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik analisis regresi satu prediktor.

Penelitian survei merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan data tertentu dengan tiga tujuan penting, diantaranya: 1. Mendeskripsikan keadaan yang alami yang hidup pada saat itu 2. Mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan 3. Menentukan hubungan sesuatu yang hidup diantara kejadian spesifik (Sukardi, 2009:193). Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 2006:3). Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi satu prediktor. Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, jika variabel independen diubah atau dinaikurunkan (Sugiyono, 2010:260).

Selanjutnya setelah diketahui secara umum tentang kondisi setiap variabel maka dilanjutkan kepada pengujian hipotesis untuk mengetahui, menganalisis, mengungkap besarnya pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan objek penelitiannya adalah seluruh juru parkir yang ada di kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan waktu selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 130 orang petugas parkir yang tersebar di seluruh Kota Tanjung Pinang. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi dan jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. (Djarwanto dan Subagyo, 2000:108). Dalam menentukan sampel, Arikunto (1998:120) menyatakan : 'untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila populasi sebanyak kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar, maka dapat diambil 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 130 orang petugas parkir yang tersebar di seluruh Kota Tanjung Pinang. Karena banyaknya populasi maka diambil sampel dengan menggunakan rumus T Tharo Yamane, dimana tingkat t presisi yang dipakai apakah $\alpha = 0.05$, artinya, tingkat kebenaran penelitian ini 95% atau kesalahan sebesar 5%. Adapun rumus penetapan sampel dimaksud adalah:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = level signifikansi yang diinginkan yaitu 0,05

Sehingga sampel yang diambil adalah

$$n = \frac{130}{130 (0.05)^2 + 1}$$

$$n = 130/1,325 \approx 102.60 = 98 \text{ orang}$$

D. Identifikasi dan Operasional Variabel

Identifikasi variabel ini terdiri dari dua yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas yaitu implementasi kebijakan publik dengan menggunakan teori Edward III yang didalamnya menyangkut empat dimensi yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumberdaya. Variabel tidak bebas yaitu efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir. Teori efektivitas retribusi menggunakan teori Sidik dan Soewondo. Tujuan disusunnya definisi operasional untuk mempermudah peneliti untuk menyusun kuesioner setiap variabel penelitian, sehingga diketahui dengan jelas dan tepat apa yang menjadi indikator setiap variabel kemudian diturunkan kedalam kuesioner.

Adapun operasionalisasi variabel implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut dalam hal ini adalah tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah itu sendiri. Agar kebijakan publik itu sukses diterapkan menurut Edward III ada 4 dimensi yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Adapun definisi operasional dan indikator setiap dimensi implementasi kebijakan public dengan mengdopsi teori Edward III adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau isi kebijakan itu secara konsisten kepada penerima pesan dimana yang menyampaikan pesan adalah juru parkir dan penerima pesan adalah masyarakat pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraanya. Dengan indikatornya adalah transmisi (media), kejelasan pesan (tarif parkir), konsistensi implementasi, pesan (tarif parkir) yang disampaikan.
- b. Sumber daya adalah daya dukung (dana dan petugas, serta sarana pendukung) untuk memberhasilkan kebijakan dilapangan. Indikatornya adalah ketersediaan staff dilapangan, kompetensi petugas parkir, wewenang petugas dan fasilitas petugas.
- c. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri yaitu juru parkir itu agar implementasi peraturan daerah dapat diterapkan. indikatornya adalah, sikap pelaksana perparkiran, kemampuan petugas, semangat kerja petugas parkir, pelatihan petugas parkir.
- d. Birokrasi adalah adanya kejelasan tugas para juru parkir dan prosedur ketika melaksanakan tugas dibarengi dengan koordinasi dan tingkat pengawasan yang dapat dikendalikan. Indikatornya adalah kejelasan standar dan prosedur, koordinasi sesama petugas parkir, uraian tugas (Tupoksi) petugas, rentang kendali pimpinan.

Sedangkan definisi operasional penerimaan restribusi parkir adalah jumlah uang yang direncanakan, kemudian diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target) penerimaan yang direncanakan. Karena itu indikator realisasi penerimaan mencakup hasil perolehan secara riil (nyata),

penghambat perolehan retribusi, dan potensi retribusi parkir. Kemudian indikator target mencakup, kejelasan target, kejelasan waktu pencapaian, ketersediaan fasilitas mencapai target dan. kesepakatan terhadap target.

Lebih jelasnya kedua variabel yang sudah dijelaskan di atas dapat disusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Parkir dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Butir
1	2	3	4	5
1	Variabel Bebas Implementasi kebijakan (X) Edward III	1. Komunikasi (<i>Communication</i>)	a. Transmisi (media)	1
			b. Kejelasan pesan (tarif parkir)	2
			c. Konsistensi implementasi	3
			d. Pesan (tarif parkir) yang disampaikan	4
		2. Sumberdaya (<i>Resources</i>).	a. Ketersediaan staff dilapangan	5
			b. Kompetensi petugas parkir	6
			c. Wewenang petugas	7
			d. Fasilitas petugas	8
		3 Disposisi (<i>Disposition</i>)..	a. Sikap pelaksana perparkiran	9
			b. Kemampuan petugas	10
			c. Semangat kerja petugas parkir	11
			d. Pelatihan petugas parkir	12
		4. Struktur birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).	a. Kejelasan standar dan prosedur	13
			b. Koordinasi sesama petugas parkir	14
			c. Uraian tugas (Tupoksi) petugas	15
			d. Rentang kendali pimpinan	16

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Butir
1	2	3	4	5
3	Variabel Tidak Bebas	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	1 Hasil perolehan secara riil (nyata) 2. Penghambat perolehan retribusi parkir 3. Potensi Retribusi Parkir	17 18 19
	Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir Teori Sidik dan Soewondo (1996:65-76)	Target Penerimaan Retribusi Parkir	1. Kejelasan target 2. Kejelasan waktu pencapaian. 3. Ketersediaan fasilitas mencapai target 4. Kesepakatan terhadap target	20 21 22 23

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Dari indikator yang sudah ditentukan, kemudian akan dijabarkan kedalam beberapa butir pertanyaan yang disusun dalam suatu kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini sebagaimana terlampir. Dalam kuesioner menggunakan skala likert dimana untuk pembobotan kriteria jawaban menggunakan Method Of Successive Interval (MSI). Metode suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. Dalam banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi Pearson, uji t dan lain sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika mempunyai data berskala ordinal; maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Daftar pertanyaan(*questionare*) yang diberikan kepada juru parkir yang ada di kota Tanjungpinang.
2. Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data berupa dokumen-dokumen yang ada di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan. Instrumen angket/ kuesioner disusun dengan menggunakan Skala Likert dengan empat pilihan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran (Skala Likert)

NO	PERNYATAAN	NILAI JAWABAN
1	Sangat Baik (SB)	4
2	Baik (B)	3
3	Kurang Baik (KB)	2
4	Tidak Baik (TB)	1

2. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen resmi yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah dokumen/ peraturan dan kebijakan yang dianggap relevan dengan konteks permasalahan yang diteliti.

G. Uji Validitas

Dilakukannya uji validitas instrumen untuk mencoba kuesioner yang disusun apakah valid atau tidak. Jumlah responden untuk uji coba dilaksanakan kepada 30 orang responden (juru parkir). Tujuannya untuk mendapatkan data yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas menggunakan alat uji statistik dengan rumus korelasi *Pearson Product Moment Correlation* Sugiyono (2008 : 138), yaitu

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi Pearson
- X_i = Skor item ke-i
- Y = Skor Total Keseluruhan item
- n = Jumlah populasi

Hasil perhitungan korelasi *Pearson Product Moment* tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel nilai – nilai *r Product Moment*, selanjutnya diinterpretasikan apabila *r* hitung > *r* tabel maka item-item kuesioner tersebut dikatakan *valid*. Kriteria yang digunakan untuk penentuan item validitas dan memiliki nilai reliabilitas yang dapat diterima didasarkan kepada tabel berikut.

Tabel 3.3
Kriteria Standar Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

	Reliabilitas	Validitas
Good (Baik)	0.8	0.5
Acceptable (Cukup Baik)	0.7	0.3
Marginal	0.6	0.2
Poor (Tidak Baik)	0.5	0.1

Sumber : Brannen Julia. (1999: 121)

Dengan demikian dikatakan memiliki nilai validitas (kehandalan) atau layak digunakan sebagai instrument penelitian. Ini berarti bahwa item-item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

H. Analisis Reliabilitas Kuesioner

Analisis *reliabilitas*/konsistensi adalah pengujian instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2008:137). Pengujian *reliabilitas* digunakan dengan pengujian *reliabilitas consistency*, atau metode belah dua (ganjil dan genap) dengan menggunakan Spearman Brown dalam Sugiyono (2008.:153), dengan rumus:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Dimana :

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = korelasi pearson antara belahan pertama dan kedua.

Dengan dilakukannya kedua pengujian tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi *valid* dan *reliabel*. Ini berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, diharapkan data penelitian menjadi *valid* dan *reliabel*. Dasar penentuan uji reliabilitas kuesioner penelitian ini mengacu kepada kriteria yang ditetapkan Brannen Julia. (1999: 121) yang mengatakan apabila nilai skor yang diperoleh di atas 0,6 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian maka instrument penelitian itu *reliable* (dapat diterima /cukup baik).

I. Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi Klasik yaitu :

1. Uji Normalitas

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi dan residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model pengujian statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang merupakan bagian yang integral dari program SPSS. Jika angka signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel hasil pengujian, menunjukkan nilai yang lebih kecil dari alpha 5 %, maka data yang digunakan dinyatakan sebagai data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika angka yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas lebih besar dari alpha 5 %, maka data yang digunakan sebagai data yang telah memenuhi asumsi klasik (Ghozali, 2005)

Menurut Sugiyono (2005) bahwa “ model yang paling baik adalah apabila datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi.”

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2005), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen yaitu implementasi kebijakan publik). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal*. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *multikolonieritas* didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya *multikolonieritas*.
3. *Multikolonieritas* dapat juga dilihat dari (1) nilai *Tolerance*, dan (2) *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan *VIF* tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya *multikolonieritas* adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas* yang dapat dilakukan dengan melihat *Grafik Plot* dan *Uji Glejser* yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependent terhadap semua

variabel independent dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Sumodiningrat, 2001).

Variabel independent signifikan dibawah 5% secara statistik maka diindikasikan terjadinya *heteroskedastisitas*. Jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5 % maka model regresi ini tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2005) .

Untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dalam model regresi menurut Ghozali (2005) adalah dengan melihat grafik antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *ZPRED* dengan *SRESID*. Deteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara lain dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah di *studentized*.

Dasar analisisnya adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

3. Model Analisis Data regresi Linear Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah model Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model persamaannya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y	= Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	= Koefisien Regresi Variabel Independen
X_1	= komunikasi
X_2	= disposisi
X_3	= birokrasi
X_4	= sumberdaya
e	= Epsilon (factor lain)

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95 % atau $\alpha = 5 \%$.

J. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dua cara yaitu uji parsial dan uji simultan.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Implementasi kebijakan didalamnya menyangkut empat dimensi yaitu komunikasi (X_1), disposisi (X_2), birokrasi (X_3), sumberdaya (X_4) terhadap Efektivitas

Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel komunikasi terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir.

$H_0 : b_1 = 0$ (Artinya komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

$H_1 : b_1 \neq 0$ (Artinya komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

2. Pengaruh variabel disposisi terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir.

$H_0 : b_2 = 0$ (Artinya disposisi secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

$H_1 : b_2 \neq 0$ (Artinya disposisi secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

3. Pengaruh variabel birokrasi terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir.

$H_0 : b_3 = 0$ (Artinya birokrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

$H_1 : b_3 \neq 0$ (Artinya birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

4. Pengaruh variabel sumberdaya terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir.

$H_0 : b_4 = 0$ (Artinya sumberdaya secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

$H_1 : b_4 \neq 0$ (Artinya sumberdaya secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

5. Pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir.

$H_0 : b_5 = 0$ (Artinya implementasi kebijakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

$H_1 : b_5 \neq 0$ (Artinya implementasi kebijakan secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Tanjungpinang).

Untuk menguji hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, digunakan t (uji t). Apabila nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 yang menyatakan $b = 0$ ditolak, maka H_1 diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut :

H_0 diterima jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 2,5 \%$

H_0 ditolak (H_1 diterima) jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 2,5 \%$

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS)* dengan versi 19.0.

Rumus Uji t adalah :

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Keterangan:

t : t hitung

$\bar{x}$: rata-rata sampel

μ_0 : rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu (yang menjadi perbandingan)

s : standart deviasi sampel

n : jumlah sampel.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua dimensi implementasi kebijakan public yaitu komunikasi (X1), disposisi (X2), birokrasi (X3), sumberdaya (X4) terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah :

H_0 : $b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$ (komunikasi (X1), disposisi (X2), birokrasi (X3), sumberdaya (X4) secara serentak tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

H_0 : $b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$ (komunikasi (X1), disposisi (X2), birokrasi (X3), sumberdaya (X4) secara serentak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan F (Uji F), dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah :

H_0 diterima, dan H_1 ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5 \%$

H_0 ditolak, dan H_1 diterima, jika F hitung $> F$ tabel pada $\alpha = 5 \%$

K. Methods Successive Interval (MSI)

Statistik yang bergantung pada distribusi tertentu dan yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi seperti pengujian hipotesis dan penaksiran parameter), memerlukan terpenuhinya persyaratan bahwa skala pengukuran minimal Interval, sedangkan bila dari data penelitian diperoleh data yang memberikan skala pengukuran Ordinal (kebanyakan dalam kasus-kasus penelitian sosial), sehingga agar analisis tersebut dapat dilanjutkan maka skala pengukuran Ordinal harus dinaikkan (ditransformasikan) ke dalam skala Interval dengan menggunakan Methods Successive Interval (MSI).

Menurut Syarifudin Hidayat (2005:55) pengertian Method of Successive Interval adalah: "Metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval". Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval yaitu:

Successive Interval dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perhatikan nilai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner
2. Untuk setiap pertanyaan tersebut, lakukan perhitungan ada berapa responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5 = frekuensi (f)
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya n responden dan hasilnya = proporsi (p)
4. Kemudian hitung proporsi kumulatifnya (p_k)

5. Dengan menggunakan tabel normal, dihitung nilai distribusi normal (Z) untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Tentukan nilai densitas normal (fd) yang sesuai dengan nilai Z
7. Tentukan nilai interval (scale value) untuk setiap skor jawaban.
8. Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu Skala Value (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan jawaban responden yang terkecil melalui transformasi berikut ini:

$$\text{Transformed Scale Value} : SV = - \{ \text{Min data} - \text{Min SV} \}$$

L. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan kegiatan penelitian maka disusun jadwal seperti tabel berikut :

Tabel 3.4
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Deskripsi Tahapan Kegiatan	Bulan											
		Juli 2017				Agustus 2017				September 2017			
		Minggu				Minggu				Minggu			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul dan Tesis												
2	Penulisan Proposal Tesis												
3	Bimbingan Proposal												
4	BTR I												
5	Perbaikan Proposal Tesis												
6	Penyusunan Penelitian												
7	Pengumpulan Data												
8	Pengolahan Data												
9	Penulisan Draf Tesis												

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Kota Tanjungpinang adalah sebuah kota di ujung selatan Pulau Bintan, dan berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan kapal laut dari Singapura dan 3 jam dari Johor-Malaysia. Kota yang sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat Melayu. Kondisi Geografisnya yang terdiri dari beberapa pulau merupakan keistimewaan tersendiri bagi Kota Tanjungpinang. Salah satu pulau yang sarat dengan sejarah adalah Pulau Penyengat, Pulau ini tidak terlalu besar, hanya 3.5 Km² akan tetapi di Pulau ini terdapat banyak peninggalan berupa potensi cagar budaya dengan wujud bangunan-bangunan arsitektural, makam, dan Situs. Disisi lain Pulau Penyengat adalah tempat kelahiran Pahlawan Nasional Bahasa Raja Ali Haji yang terkenal dengan *Gurindam 12*-nya ini terletak pada lokasi yang sangat strategis yaitu berada di sebelah barat Kota Tanjungpinang.

Konon suatu ketika para pelaut yang sedang mengambil air tawar tersebut diserang oleh sejenis lebah yang disebut Penyengat. Akibat serangan lebah tersebut, jatuh korban jiwa dari pelaut. Sejak saat itulah pulau ini dinamakan Penyengat Indera Sakti dan selanjutnya lebih dikenal dengan Pulau Penyengat sampai sekarang. Karena letaknya yang cukup strategis bagi pertahanan, Pulau Penyengat dijadikan Pusat Kubu pertahanan Kerajaan Riau oleh Raja Haji yang Dipertuan Muda Riau IV (termasyhur dengan gelar Raja Haji Syahid Fisabilillah/Marhum Teluk Ketapang) ketika melawan Belanda

pada tahun 1782-1784. Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan yang bersebelahan dengan :

- Sebelah utara : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Sebelah Barat : Kecamatan Galang Kota Batam.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 KM2 dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi laut. Sedangkan visi dan misi kota Tanjungpinang adalah “Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020.” Sedangkan Misi, 1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kota, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan, dengan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, efektifitas pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan tata nilai kebudayaan Melayu dan kaedah-kaedah keagamaan dalam rangka menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pengembangan Pariwisata di kawasan Riau Kepulauan. 4. Mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas kota dalam rangka pengembangan wilayah, pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan kawasan tertinggal, yang bertumpu pada agribisnis dan

agroindustri yang berwawasan lingkungan. 5. Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama di dalam maupun dengan luar negeri untuk memperlancar akses komunikasi dan transformasi guna mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan serta pengembangan potensi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya Melayu. 6. Memelihara dan memantapkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat kota yang agamis dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya melayu yang toleran dan terbuka. 7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas guru pemerintahan kota untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kota agar lebih efektif, handal, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kota.

Sedangkan tempat objek penelitian adalah di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada BAB IV disebut salah satu Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsinya pada Pasal 3 disebut (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian wewenang Daerah. Pada pasal 4 disebut fungsinya adalah Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum.

B. Hasil Penelitian

Adapun jumlah kendaraan bermotor di kota Tanjungpinang tahun 2016 adalah sebagai berikut sepeda motor dan sejenisnya sebanyak 63.803 unit, sedan dan sejenisnya sebanyak 1.344 unit, Jeep dan sejenisnya sebanyak 1.478 unit, bus/microbus dan sejenisnya sebanyak 11.003 unit, truk dan sejenisnya sebanyak 2.465 unit, dan pickup sebanyak 1.528 unit (sumber: Samsat Kota Tanjungpinang).

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan gambaran umum objek penelitian di atas maka akan dilanjutkan kepada penyajian karakteristik responden yang mencakup kepada (a). Umur responden (b). Jenis kelamin responden, (c). Tingkat pendidikan responden dan (d) Masa kerja responden. Jika diamati hasil pengumpulan data mengenai umur responden ditemui variasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Petugas Parkir
Kota Tanjungpinang

No.	Kelompok Umur	Jumlah (f)	Persentase (%)
1.	26 – 37 tahun	67	68
2.	38 – 49 tahun	27	27
3.	50 – 60 tahun	4	8
Jumlah		98	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan tabel 4.1. karakteristik responden menurut umur petugas parkir dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia 26-37 tahun yaitu sebanyak 67 orang (68%) dan minoritas berusia 50-60 tahun yaitu sebanyak 4 orang (8%). Jika dicermati usia potensial petugas parkir untuk dikembangkan pada masa yang akan datang sebanyak 67 orang sebagai usia produktif menjadi pelayan juru parkir di kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, data mengenai jenis kelamin responden dapat disajikan pada tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2.
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (f)	Persentase (%)
1.	Pria	91	93
2.	Wanita	7	7
Jumlah		98	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 91 orang (93%) dan minoritas berjenis wanita sebanyak 7 orang (7%). Sedangkan tingkat pendidikan responden dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (f)	Persentase (%)
1.	SD	45	46
2.	SMP	21	21
3.	SLTA	30	30
4.	Diploma	2	1
Jumlah		98	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 45 (46%). Sedangkan masa kerja responden ditemui variasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah (f)	Persentase (%)
1.	1 – 5 tahun	85	87
2.	6 – 10 tahun	13	13
Jumlah		98	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 85 orang (87%).

Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil analisis penelitian dimulai dari hasil analisis kuesioner untuk variabel implementasi kebijakan retribusi parkir dengan efektivitas retribusi parkir yang akan diuraikan pada uraian berikut ini.

2. Hasil Analisis Validitas Variabel Implementasi Kebijakan

Instrumen variabel implementasi kebijakan retribusi parkir terdiri dari 16 pertanyaan yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan yang ditetapkan dalam Bab III. Adapun hasil perhitungan uji validitas seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi
Kebijakan Retribusi Parkir(X)

Variabel	Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi	R tabel	Kesimpulan
Implementasi	Komunikasi	1	0.716	0,374	Valid
		2	0.483	0,374	Valid
		3	0.839	0,374	Valid
		4	0.841	0,374	Valid
	Disposisi	5	0.807	0,374	Valid
		6	0.759	0,374	Valid
		7	0.698	0,374	Valid
		8	0.739	0,374	Valid
	Birokrasi	9	0.789	0,374	Valid
		10	0.759	0,374	Valid
		11	0.807	0,374	Valid
		12	0.733	0,374	Valid
	Sumberdaya	13	0.607	0,374	Valid
		14	0.807	0,374	Valid
		15	0.739	0,374	Valid
		16	0.807	0,374	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dikatakan valid, sebab ke-16 pertanyaan. Sebab menurut Barker, et.al. (2002:70) mengatakan apabila nilai skor yang diperoleh di atas 0,5 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian maka instrumen tersebut dikatakan memiliki validitas (kehandalan) atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Ini berarti bahwa setiap item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur implementasi

kebijakan retribusi parkir di kota Tanjungpinang dikatakan memiliki kehandalan (valid).

3. Hasil Analisis Validitas Variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Instrumen untuk variabel mengukur uji validitas efektivitas retribusi parkir terdiri dari 7 pertanyaan. Hasil perhitungan menunjukkan seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Retribusi Parkir (Y)

Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi	R tabel	Kesimpulan
Efektivitas Retribusi	1	0.764	0.374	Valid
	2	0.506	0.374	Valid
	3	0.724	0.374	Valid
	4	0.765	0.374	Valid
	5	0.802	0.374	Valid
	6	0.536	0.374	Valid
	7	0.400	0.374	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel efektivitas retribusi Parkir dikota Tanjungpinang dapat dikatakan valid atau memiliki kehandalan. Ini berarti bahwa item-item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kualitas retribusi parkir Kota Tanjungpinang pada dimensi target dan realisasi dapat diukur.

4. Hasil Analisis Pengujian Reliabilitas Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir (X) dan efektifitas retribusi parkir

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel implementasi kebijakan retribusi parkir dengan menggunakan metode belah dua *split-half* dengan

hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Implementasi
Kebijakan dan Retribusi Parkir (X)

No	Dimensi	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Implementasi Kebijakan	0,956	Reliabel
2	Restribusi Parkir	0,853	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2017

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel implementasi kebijakan retribusi parkir dan efektivitas retribusi parkir dapat dikatakan reliabel. Dasar penentuan uji reliabilitas kuesioner penelitian ini mengacu kepada kriteria yang ditetapkan Barker, et. al. (2002:70) yang mengatakan apabila nilai skor yang diperoleh di atas 0,6 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian maka instrument penelitian itu reliable (dapat diterima /cukup baik).

Dengan adanya uji validitas dan reliabilitas maka diperoleh informasi bahwa jawaban responden terhadap kuesioner impementasi kebijakan publik dan efektivitas retribusi parkir memperlihatkan kekonsistenan, sehingga hasil perolehan skor jawaban kuesioner dapat dipergunakan dan dianalisis lebih lanjut.

Dengan adanya uji reliabilitas ini maka diperoleh informasi bahwa jawaban responden terhadap kuesioner memperlihatkan kekonsistenan, sehingga hasil perolehan skor jawaban kuesioner dapat dipergunakan dan dianalisis lebih lanjut.

5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.

Kedudukan analisis deskriptif dari data penelitian ini adalah memberikan gambaran secara deskripsi tentang variabel-variabel penelitian. Frekuensi tanggapan 98 responden petugas parkir di Kota Tanjungpinang terhadap variabel efektivitas pengumpulan dana parkir di kota Tanjungpinang setelah dikoleksi dan diolah disajikan pada Tabel-Tabel Frekwensi untuk implementasi kebijakan retribusi parkir dan efisiensi pengutipan parkir.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert interval 1 s.d 4. Untuk pertanyaan yang mendukung, pemaknaan untuk Sangat Baik dengan bobot 4, Baik dengan bobot 3, Kurang Baik bobot 2, Tidak Baik bobot 1. Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis frekuensi tanggapan responden terhadap variabel penelitian dengan batasan seperti berikut :F4 = banyaknya responden yang merespon Sangat Baik, F3 = Baik, Kurang Baik F2 dan Tidak Baik = F4 yaitu banyaknya responden yang memiliki jawaban Tidak Baik. Skor tanggapan responden terhadap suatu item pernyataan = $4 \times F4 + 3 \times F3 + 2 \times F2 + 1 \times F1$. Kriteria tanggapan responden ditentukan sebagai atas dasar jumlah responden sebanyak 98 orang. Karena itu, skor minimum bila responden memilih angka 1 yang berarti skor tanggapan satu pernyataan = $98 \times 1 = 98$ dan skor maksimumnya bila responden memilih angka 4 yang berarti skornya adalah $98 \times 4 = 392$. Sedangkan rentang interval didapat dari hasil skor maksimum dikurangi skor minimum kemudian dibagi 4, sehingga diperoleh nilai range/rentang =

$(392 - 98)/4 = 73.5$ dengan demikian diperoleh kriteria tanggapan responden terhadap suatu pernyataan tentang variabel penelitian seperti pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8.
Kriteria Tanggapan Responden

No	Kriteria	Arti Tanggapan Responden
1	98 - 171.5	Tidak Baik
2	172 - 245.5	Kurang Baik
3	246 - 319.5	Setuju/Baik
4	320 - 392	Sangat Setuju/Sangat Baik

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan kriteria tabel 4.8 di atas kemudian dilanjutkan dengan perhitungan tabel frekwensi atas tanggapan responden terhadap variabel implementasi kebijakan maka dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

No Item	Tanggapan responden				N	Skor	Keterangan
	F1	F2	F3	F4			
1	-	2	12	84	98	376	Sangat baik
2	-	1	21	76	98	369	Sangat baik
3	-	3	15	80	98	371	Sangat baik
4	-	1	25	72	98	365	Sangat baik
5	-	4	34	60	98	350	Sangat baik
6	-	3	36	59	98	350	Sangat baik
7	-	3	18	77	98	368	Sangat baik
8	-	2	31	65	98	357	Sangat baik
9	-	-	35	63	98	357	Sangat baik
10	-	2	27	69	98	361	Sangat baik
11	-	-	36	62	98	356	Sangat baik
12	-	1	17	80	98	373	Sangat baik
13	-	1	29	68	98	361	Sangat baik
14	-	3	33	62	98	353	Sangat baik
15	-	4	23	71	98	361	Sangat baik
16	-	2	34	62	98	354	Sangat baik

No	Tanggapan responden				N	Skor	Keterangan
Item	F1	F2	F3	F4			
Jumlah	-	32	426	1110	1568	5782	
						5782/16 361.375	Sangat Baik

Sumber: data penelitian diolah 2017

Pada Tabel 4.9 tampak bahwa rata-rata responden cenderung mengatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Tanjungpinang tergolong sangat baik, karena skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel implementasi kebijakan memiliki skor 361.375 masuk dalam kriteria sangat baik.

Apabila dianalisis untuk masing-masing indikator, untuk indikator komunikasi, transmisi (media) yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan memiliki nilai yang paling tinggi sehingga bisa disimpulkan bahwa pemilik kendaraan yang parkir di tepi jalan mudah memahami transmisi (media) tentang retribusi parkir di jalan raya, sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu mengenai bahasa yang disampaikan oleh petugas parkir kepada pemilik kendaraan bermotor, hal ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, perlu diadakan semacam pelatihan terutama mengenai bahasa baku yang digunakan oleh petugas parkir kepada pemilik kendaraan bermotor.

Untuk indikator sumber daya, yang paling tinggi yaitu mengenai kewenangan yang dimiliki pelaksana petugas parkir dalam bekerja, petugas parkir sudah melaksanakan kewenangannya dengan baik,

sedangkan yang paling rendah yaitu ketersediaan petugas pelaksana parkir dan kompetensi yang dimiliki petugas parkir pelaksana dilapangan, hal ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Untuk indikator disposisi, paling tinggi yaitu pelaksanaan pekerjaan sebagai petugas parkir sudah sesuai dengan harapan para pemarkir kendaraan sedangkan yang terendah yaitu insentif yang diberikan kepada pelaksana petugas parkir, terkadang berdasarkan pantauan dilapangan, tidak sedikit para petugas parkir apabila tidak ada kembalian uang parkir, maka orang-orang yang sudah memarkirkan lebih harus mengikhlaskan kembaliannya tersebut, walaupun sebenarnya mereka berharap kembaliannya dikembalikan, sebelum melakukan petugas parkir, sebaiknya para petugas parkir mempersiapkan uang recehan untuk kembalian khususnya apabila ada yang sudah memarkirkan mobil tidak bisa membayar dengan uang pas.

Untuk indikator struktur birokrasi, para pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya, beranggapa bahwa kejelasan standardan prosedur pengutipan parkir dan uraian tugas (tupoksi) pelaksana parkir sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sudah sangat baik dalam pelaksanaan dilapangan sedangkan koordinasi antar sesama petugas parkir dilapangan dalam bekerja harus mendapatkan perhatian lagi. Secara umum pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang perpakiran sudah sangat baik. Namun walaupun demikian, kewenangan dan tanggungjawab pelaksana dalam melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing oleh para juru parkir tergolong sangat baik namun tidak serta merta diimbangi

dengan pencapaian target penerimaan retribusi parkir. Jika diinterpretasikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir tergolong kurang baik dalam implementasinya sehingga implikasinya efektivitas penerimaan retribusi parkir menjadi rendah, bahkan pada tahun 2013 hanya tercapai 85,47 % dari target Rp.450.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.384.625.000, pada tahun 2014 hanya tercapai 67,80 % dari target Rp.600.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.406.809.000,-, pada tahun 2015 hanya tercapai 58,26 % dari target Rp.750.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.436.952.900,-, pada tahun 2016 hanya tercapai 70,76 % dari target Rp.1.350.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.955.267.500,-. Ini mencerminkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, analisis frekuensi tanggapan responden terhadap variabel efektivitas retribusi parkir dapat disajikan pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10.

Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Efektivitas Retribusi Parkir

No Item	Tanggapan responden				N	Skor	Keterangan
	F1	F2	F3	F4			
1	-	2	29	67	98	359	Sangat Baik
2	-	1	36	61	98	354	Sangat Baik
3	-	3	23	72	98	359	Sangat Baik
4	-	2	34	62	98	354	Sangat Baik

No	Tanggapan responden				N	Skor	Keterangan
	F1	F2	F3	F4			
5	-	4	18	76	98	366	Sangat Baik
6	--	1	30	67	98	360	Sangat Baik
7	-	-	22	76	98	370	Sangat Baik
Jumlah		436	212	38	686	$\frac{2522}{7}$ =360.2857	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah 2017

Pada Tabel 4.10. tampak bahwa rata-rata responden cenderung menanggapi efektivitas pengumpulan retribusi parkir di kota Tanjungpinang tergolong kurang baik dengan skor 360.2857. Artinya bahwa efisiensi retribusi parkir di Kota Tanjungpinang termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan sub indikator efisiensi, yang memiliki skor tertinggi yaitu mengenai perlu tidak nya kesepakatan terhadap target yang hendak dicapai sebelum pekerjaan pengutipan retribusi dilakukan, responden berpendapat bahwa kesepakatan ini sangat diperlukan, agar target retribusi parkir bisa tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan, sedangkan sub indikator yang memiliki nilai terendah yaitu beranggapan bahwa faktor penghambat perolehan retribusi parkir dilapangan dan kesepakatan kejelasan target retribusi parkir, ini lah sebagai sebab bahwa target retribusi parkir di Kota Tanjungpinang belum tercapai.

6. Analisis Regresi untuk mengetahui pengaruh implementasi perda terhadap efektifitas retribusi parkir

Sebelum peneliti melakukan analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi ganda, terlebih dahulu peneliti melakukan uji asumsi klasik. Sebab aturan main menggunakan regresi ganda apabila

data yang diperoleh diasumsikan memenuhi (1). normalitas, (2). heteroskedastisitas, (3). multikolinearitas (4). Autokorelasi.

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kebenaran model regresi linier berganda yang digunakan sipeneliti dalam pengujian hipotesis yaitu Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Untuk dapat menggunakan regresi berganda, maka data yang digunakan harus memenuhi persyaratan asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Asumsi-asumsi tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk populasi kecil dengan sampel 98 orang juru parkir tepi jalan. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran data *print out* berikut ini:

Tabel 4.11. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	98

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0678
	Std. Deviation	2.66469964
Most Extreme Differences	Absolute	.630
	Positive	.769
	Negative	-.638
Test Statistic		.638
Asymp. Sig. (2-tailed)		.576 ^c

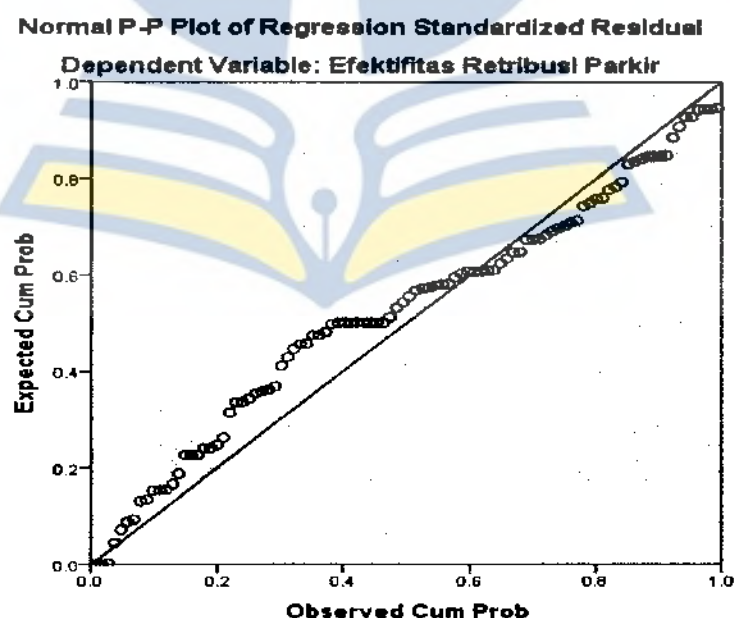
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

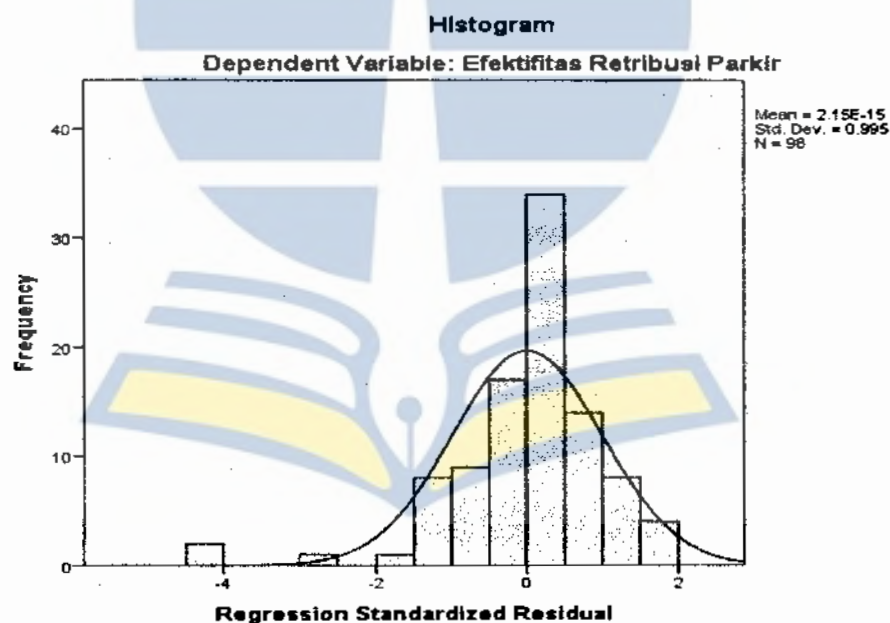
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Berdasarkan hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.576 ini mencerminkan bahwa nilai signifikansi 0.576 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal. Adapun pendekatan grafik (histogram dan Normal P-P Plot dan grafik histogram) sebagaimana disajikan pada data print out berikut ini.



Gambar 4.1
Normal P-P Plot of Regression

Gambar 4.1 menunjukkan nilai-nilai sebaran error yang berupa dot terletak di sekitar garis lurus dan tidak terpencar jauh dari garis lurus, dengan demikian maka disimpulkan bahwa persyaratan asumsi normalitas terpenuhi, artinya uji regresi ganda tentang variabel implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bila dilihat dari data dari distribusi sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Histogram Uji Normalitas Data Variabel Y
Sumber: Data Primer 2017

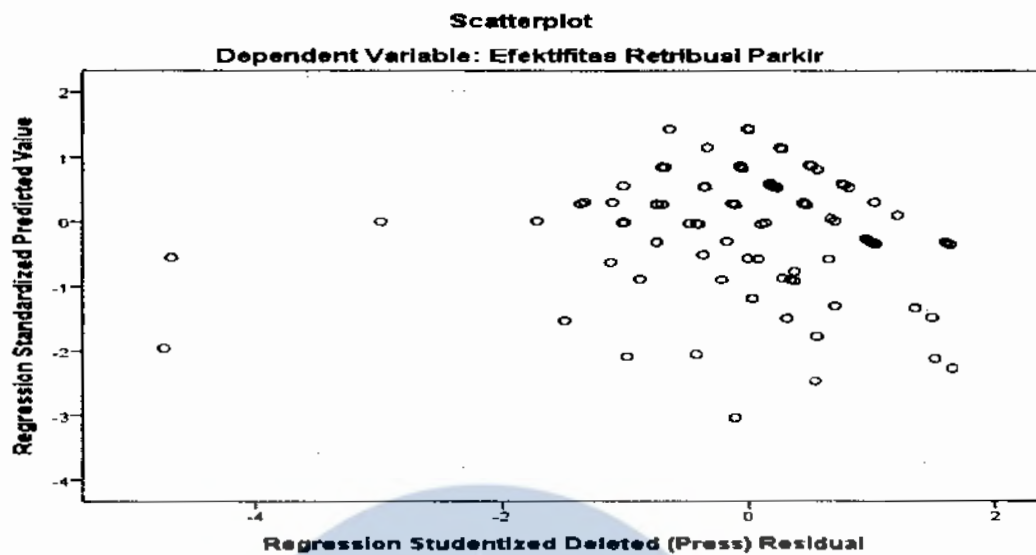
Histogram pada Gambar 4.2 menjelaskan bahwa data distribusi nilai residu (error) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal yang diperlihatkan oleh garis lengkung berbentuk bel. Dengan

demikian pada gambar 4.1 dan 4.2 memberi kesimpulan bahwa residu dari model dianggap berdistribusi normal. Kedua gambar tersebut menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dalam penelitian ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada model yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari model *Scatterplot* model tersebut.

Jika model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian ini tetapi jika output *Scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data yang tidak berpola jelas, serta titik-titik yang menyebar. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa model regresi bahwa residu yang ada mempunyai varians yang konstan dan regresi tidak terlihat residu meningkat atau menurun dengan pola tertentu. Grafik memberi makna bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *scatterplot* berikut ini:



Gambar 4.3
Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer 2017.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel dependent dengan variabel independent bersifat linier dalam model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji multikolinearitas adalah apabila nilai VIF dibawah 10 tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai VIF melebihi angka 10, maka disimpulkan telah terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Implementasi Kebijakan	1.000	1.000

Berdasarkan gambar pada Tabel 4.12 diketahui nilai VIF implementasi kebijakan sama dengan 1 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas atau masih bisa ditoleransi. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh antara satu variabel independent dengan dependent yaitu pengaruh Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang bersifat linier dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari uji Durbin-Watson standar untuk menentukan adanya atau tidaknya autokorelasi secara umum adalah:

- 1) Angka DW = 2 berarti autokorelasi positif
- 2) Angka DW < 1.5 berarti ada gejala autokorelasi
- 3) Angka DW diantara 1.5 – 2.5 berarti tidak ada autokorelasi
- 4) Angka DW diatas > 2 – 4 berarti ada autokorelasi negatif

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.13

Uji Autokorelasi Variabel X terhadap Variabel Y

Model	Durbin-Watson
1	1.806

Sumber : Data Diolah 2017

Tabel 4.13 nilai Durbin Watson sebesar 1.806 atau berkisar antara 1.5 – 2.5. Pengukuran di atas berdasarkan variabel Y sebagai variabel dependennya. Karena nilai DW (Durbin-Watson) berada diantara 1.5- 2.5 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memperlihatkan adanya gejala otokorelasi. Dengan demikian berdasarkan keempat asumsi-asumsi statistik di atas maka alat uji regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi yang diharapkan. Karena itu pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda dapat dilanjutkan pada uraian berikut.

7. Uji Hipotesis

Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen (bebas) berskala kuantitatif terhadap satu variabel dependen (tidak bebas). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Adapun persamaan regresi berganda yaitu $Y = a + b_1x_1 + \varepsilon$. Lebih jelasnya, hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
B	Std. Error			Tolerance	VIF

-0.134	2.615	-0.051	.009		
.445	.050	8.850	.000	1.000	1.000

Tabel 4.14 persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah: efektivitas penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Y) = $-0.134 + 0.445X$ persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. $Y = \text{Konstanta} = -0.134$ ini menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol. Artinya, apabila pimpinan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tidak mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum maka penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tidak akan efektif. Apabila Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak diimplementasikan atau nilai X sama dengan nol, maka efektifitas menjadi negatif atau tidak efektif sebesar 0.134 point. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang di ciptakan Edward III dimana pada saat tidak mengimplementasikan perda maka penerimaan retribusi menjadi tidak efektif. Meski demikian yang menentukan efektivitas penerimaan retribusi parkir Tanjungpinang masih ada faktor lain yang masih tidak terdeteksi (*ε/epsilon*) yang turut mempengaruhinya. Misalnya, pengawasan, kepemimpinan, insentif kepada petugas juru parkir dan lain-lain.
2. Koefisien regresi X (implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum) = 0.445, artinya, apabila

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diimplementasikan maka dapat meningkatkan efektifitas penerimaan retribusi parkir di Tanjungpinang sebesar 0.445 point.

Karena itu, jika ingin meningkatkan target parkir yang dicapai petugas parkir besarnya target itu sebaiknya melalui pimpinan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang harus mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum melalui berbagai dimensi implementasi yang ada yaitu mewujudkan komunikasi yang baik antara juru parkir dengan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya, pemberian disposisi pekerjaan yang sesuai, birokrasi yang baik serta sumber daya yang memenuhi kriteria yang memadai.

8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Selanjutnya untuk mengetahui pengujian koefisien determinasi atau R^2 adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dijabarkan melalui dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya dapat menjelaskan efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dapat dihitung melalui perhitungan koefisien determinasi atau R.square adjusted (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.444	2.67854	1.806

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

b. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

Sumber : Data Dolah 2017

Hasil perhitungan nilai R^2 determinasi hasil analisis regresi berganda di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi R.square sebesar 0,444 artinya 44,4% artinya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan melalui dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya dapat menerangkan atau menjelaskan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebesar 44.4%. Sedangkan sisanya sebesar 55.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya insentif, kepemimpinan, pengawasan dan lain-lain.

Adanya pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tentu mencerminkan betapa baiknya regresi digunakan dalam penelitian ini, dan tentu keempat dimensi yang membangun implemenentasi itu tidak boleh diabaikan, bahkan harus dikelola dengan baik. Sebab, kesuksesan sebuah kebijakan diterapkan sangat tergantung kepada komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial atau satu persatu akan diuji pada uraian berikut.

9. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Sebagaimana disajikan pada Bab II terdahulu bahwa hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini ada satu hipotesis, dengan

Hipotesis Nol:

Tidak ada Pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (X) terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Y).

Hipotesis Alternatif:

Ada Pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (X) terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Y).

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{XY} = 0$ Tidak terdapat pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

$H_1 : \rho_{XY} \neq 0$ Terdapat pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Kriteria pengujian hipotesis menggunakan alat uji t apabila:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $98-4-1$, maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu X terhadap Y.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $98-4-1$ maka H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap Y.

Selanjutnya jika dilakukan perhitungan maka diperoleh nilai t_{hitung} variabel implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 sebesar 8.85 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.9858. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 berpengaruh secara signifikan (0.000 lebih besar daripada 0.05) terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang benar dan terbukti. Artinya ada pengaruh implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi.

Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk menguji hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di

tepi jalan umum dapat menggunakan pengujian memakai Kota Tanjungpinan Tabel Anova atau Uji Simultan (F_{test}) atau dengan memakai alat uji F.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_1, b_2, b_3, = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan pengujian memakai Kota Tanjungpinang.

$H_0 : b_1, b_2, b_3, = 0$, berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam seluruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan pengujian memakai Kota Tanjungpinang.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 diterima H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitasnya F signifikan $> 0,05$
- b. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitasnya nilai F signifikan $< 0,05$

Hasil uji F dapat dilihat pada output berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	561.973	1	561.973	78.328	.000 ^b
	Residual	688.761	96	7.175		
	Total	1250.733	97			

a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

b. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

Sumber : data diolah 2017

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.16 di atas didapatkan hasil perhitungan untuk nilai F_{hitung} sebesar $78,328 > F_{tabel}$ sebesar 2.47. Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama atau serentak variabel komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya yang menjabarkan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan pengujian memakai Kota Tanjungpinang dengan pengaruh signifikan karena dibawah α 0.05 yaitu 0.000.

Dengan demikian model regresi ini cukup baik digunakan untuk menghitung menaksir atau meramalkan pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang. Jika dikaitkan dengan teori yang mengatakan ada pengaruh implementasi kebijakan yang didalamnya menyangkut komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan pengujian memakai Kota Tanjungpinang sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hartawan dalam tesisnya yang berjudul "Pengaruh Implementasi

Kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pemerintah Kota Palu (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Pemerintah Kota Palu)” Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kota Palu. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor ini komunikasi memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir sedangkan sumber daya memberikan pengaruh yang paling lemah.

<http://jurnal.umpalangkaraya.ac.id/ejurnal/pp/view/533> diunduh 29

Agustus 2017 Jurnal : Pencerah Publik Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan statistik dan kriteria keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dikatakan bahwa hipotesis kelima yang diajukan peneliti pada bab terdahulu adalah terbukti dan dapat diterima. Dengan dilakukannya pengujian hipotesis di atas yang secara umum dapat diterima yaitu ada pengaruh baik secara parsial maupun simultan maka akan dilanjutkan kepada pembahasan berikut ini.

10. Pengujian regresi untuk masing-masing dimensi yang berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan retribusi parkir

Uji Hipotesis

Apabila Variabel implementasi perda dijabarkan langsung kedalam beberapa variabel yaitu komunikasi (X1), disposisi (X2), birokrasi (X3), sumberdaya (X4) terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang kemudian dilakukan analisis regresi maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.

Adapun persamaan regresi berganda yaitu $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + \varepsilon$. Lebih jelasnya, hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Terhadap 4 Dimensi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.443	2.267		1.518	.132
komunikasi	.059	.106	.038	.553	.582
disposisi	.178	.078	.149	2.280	.025
birokrasi	.959	.123	.586	7.830	.000
sumber daya	.318	.094	.257	3.371	.001

Tabel 4.17 persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah: efektivitas penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Y) = $3.443 + 0.059X_1 + 0.178X_2 + 0.959X_3 + 0.318X_4$ persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Y yaitu Konstanta = 3.443 ini menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X_1 , X_2 , X_3 , X_4 bernilai nol. Artinya, apabila pimpinan Dinas Perhubungan

Kota Tanjungpinang tidak mampu mengimplementasikan X_1, X_2, X_3, X_4 atau kebijakan retribusi parkir maka penerimaan retribusi parkir akan mengalami penurunan sebesar 3.443. Sebaliknya, apabila petugas parkir kota Tanjungpinang mampu meningkatkan komunikasi (X_1), disposisi (X_2), birokrasi (X_3), sumberdaya (X_4) maka efektivitas penerimaan retribusi parkir akan yang mengalami peningkatan sebesar 3.443.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik yang di ciptakan Edward III tampak memperkuat atau sejalan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Artinya, komunikasi (X_1), disposisi (X_2), birokrasi (X_3), sumberdaya (X_4) maka efektivitas penerimaan retribusi parkir Tanjungpinang.

Meski demikian yang menentukan efektivitas penerimaan retribusi parkir Tanjungpinang masih ada faktor lain yang masih tidak terdeteksi (*epsilon*) yang turut mempengaruhinya. Misalnya, pengawasan, kepemimpinan, insentif kepada petugas juru parkir dan lain-lain.

- a. Koefisien regresi X_1 (komunikasi) = 0.059. Artinya, apabila terdapat proses komunikasi yang baik dengan petugas juru parkir maupun dengan masyarakat yang hendak membayar retribusi parkir misalnya, membuat pengumuman tarif parkir disetiap tepi jalan sebesar ukuran pamflet yang mudah dibaca publik maka akan dapat mendongkrak efektivitas penerimaan retribusi parkir. Artinya, juru parkir akan semakin efektif menerima biaya parkir dari pemilik kendaraan jika

diumumkan di setiap pinggir jalan disamping pesan yang disampaikan dalam bentuk karcis yang mudah dibaca atau dikomunikasikan.

- b. Koefisien regresi X_2 (disposisi) = 0.178. Artinya, apabila terdapat perubahan sikap (disposisi) petugas parkir untuk melaksanakan kutipan tarif parkir kepada pemilik kendaraan misalnya dengan sikap membantu untuk menggeser posisi atau menempatkan posisi mobil pada tempat yang aman atau selalu memandu pemilik mobil untuk memarkirkan mobilnya maka akan dapat meningkatkan sebesar satu satuan peningkatan penerimaan retribusi parkir. Sebaliknya, jika petugas parkir dengan sikap tidak empati atau tidak peduli kepada pemilik kendaraan, bahkan ketika mobil pemilik bergerak dari lokasi parkir tiba-tiba juru parkir datang menagih maka efektivitas penerimaan parkir akan mengalami penurunan sebab pemilik kendaraan akan berkeberatan membayar atau tidak mau membayar karena tidak dipandu ketika hendak parkir. Karena itu, petugas parkir hendaklah jangan hanya menerima biaya parkir tanpa ada panduan atau tuntutan kepada pemilik kendaraan untuk memarkirkan mobilnya.

- c. Koefisien regresi X_3 (birokrasi) = 0.959. Artinya, apabila terdapat perbaikan birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebesar satu satuan seperti perbaikan jalur birokrasi dalam bentuk mempersingkat hubungan kerja dengan petugas parkir atau antara petugas parkir dengan staf Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan hubungan yang singkat akan dapat meningkatkan efektivitas

penerimaan retribusi parkir sebesar 0.959. Sebaliknya, jika jalur birokrasi yang berbelit-belit dimana petugas juru parkir ketika ingin menyampaikan besarnya penetapan target retribusi yang hendak dicapai tidak memungkinkan di lokasi parkir dengan kendaraan mobil atau sepeda motor sangat sedikit sementara target yang harus dicapai sangat tinggi maka akan membuat juru parkir sulit mencapai target atau mengalami penurunan sebesar 0.959.

- d. Koefisien regresi X_4 (sumberdaya) = 0.318. Artinya, apabila terdapat perbaikan kualitas sumberdaya seperti peningkatan kompetensi sumberdaya petugas parkir sebesar satu satuan seperti perbaikan pelatihan pemandu parkir di setiap titik parkir di Kota Tanjungpinang sementara variabel independen lainnya tetap maka efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar 0.318. Demikian juga pembangunan pamflet batas tarif parkir setiap jam di setiap sudut jalan maka akan membuat efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan setiap pemilik kendaraan ketika memparkirkan kendaraannya sudah paham berapa rupiah yang hendak dibayarkannya.

Jika diamati dari hasil perhitungan di atas, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yaitu

disposisi, birokrasi dan sumber daya dan faktor yang paling berpengaruh efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan adalah sub variabel birokrasi dengan skor 0.959. Artinya, dapat dipahami karena para juru parkir mengetahui target yang hendak dicapai adalah dari pegawai petugas lapangan bukan langsung dari pimpinan dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Sebab informasi yang diperoleh tentang besarnya target yang hendak dicapai adalah melalui petugas lapangan.

Karena itu, jika ingin meningkatkan target parkir yang dicapai petugas parkir besarnya target itu sebaiknya melalui pimpinan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Artinya, jalur birokrasi sangat menentukan dan perlu diperhatikan agar capaian sesungguhnya target parkir bisa diketahui dengan pasti, bukan melalui pihak ketiga. Jika jalur birokrasi atau para juru parkir tahu berapa jumlah target yang hendak dicapai akan membuat mereka ada kepastian untuk mengejar target sehingga efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang semakin lebih baik.

C. Pembahasan Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan melalui dimensi Komunikasi, birokrasi, disposisi dan sumber daya terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir

Jika dikaitkan dalam konteks pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing antar daerah.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai esensinya, dalam konteks pemerintahan dituntut pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Untuk mewujudkannya perlu dilaksanakan pembangunan yang merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan pembangunan tentu membutuhkan pendanaan yang memadai yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah penerimaan retribusi parkir ditepi jalan khususnya di kota Tanjungpinang.

Untuk menagih retribusi parkir tentu dibutuhkan kebijakan publik yang mengaturnya berupa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Agar kebijakan itu sukses diterapkan atau diimplementasikan kepada target grup yaitu pemilik kendaraan yang memparkirkan kendaraannya ditepi jalan maka harus ada eksekutornya dilapangan itu para juru parkir.

Agar para juru parkir sukses menerapkan kebijakan tersebut yaitu tercapainya penerimaan retribusi parkir maka harus terlebih dahulu dikomunikasikan kepada mereka dan juga kepada pemilik kendaraan untuk menentukan tarif parkir ditepi jalan. Artinya dari sudut komunikasi isi kebijakan publik itu harus dipahami semua stakeholders. Tentu saja isi kebijakan itu harus dipahami isi pesan atau kebijakan yang disampaikan. Misalnya, berapa tarif parkir per setiap jam, berapa targat yang harus dicapai

oleh juru parkir, dimulai jam berapa mereka bekerja untuk mengutip biaya parkir semuanya itu harus berjalan dengan efektif.

Berkomunikasi yang efektif berarti kepala dinas Perhubungan dan juru parkir harus sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan di atas yaitu berapa tarif parkir per setiap jam, berapa target yang harus dicapai oleh juru parkir.

Jika isi pesan tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang belum dipahami semua stakeholders belum dipahami dengan baik akan menimbulkan salah pengertian sehingga kebijakan itu gagal diterapkan dilapangan.

Komunikasi yang efektif tidak lain apabila terdapat saling pengertian tentang pemahaman isi kebijakan itu sendiri, sehingga bermanfaat dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang pada gilirannya efektivitas penerimaan restribusi parkir dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian sikomunikator baik juru parkir dan sipemilik kendaraan juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Sebab apabila ada hambatan berkomunikasi seperti hambatan fisik dimana juru parkir memiliki kelemahan mental dalam berbicara ketika menagih iuran parkir maka pemilik kendaraan akan bingung atau tidak mengerti apa pesan yang hendak disampaikan.

Karena itu, komunikasi yang efektif harus ada keterampilan sikomunikator yang mumpuni yaitu memiliki kemampuan antar perorangan

adalah kemampuan untuk terus menerus membangun kredibilitas dan dapat dipercayanya segala apa yang kita komunikasikan. Untuk membangun kredibilitas harus ada isi pesan yang jelas, suara/intonasi dalam menyampaikan pesan dan wahana bagaimana orang itu menyampaikan pesan..

Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh juru parkir ketika melaksanakan tugasnya adalah adanya keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam proses berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu solusi atau ketenangan untuk masing-masing pihak. Sehingga tujuan utama dalam komunikasi yang efektif adalah sebuah win-win solution.

Komunikasi efektif yang dilakukan juru parkir harus dapat membangun sebuah kesamaan keinginan dari sebuah informasi yang disajikan. Misalnya, tarif parkir per jam Rp 2000 jika lewat dua jam menjadi Rp 3000. Ini perlu dikomunikasikan kepada pemilik kendaraan dan pesan ini harus dipublikasikan di tepi jalan lokasi parkir. Isi pesan ini harus disampaikan kepada semua publik, sehingga tujuan yang ingin diraih dapat dilakukan secara bersama-sama.

Komunikasi akan efektif bisa dilakukan dengan langsung pada prakteknya khususnya kepada juru parkir. Misalnya ketika memandu kendaraan yang hendak parkir harus dipraktekkan, tidak boleh tiba-tiba juru parkir datang menasihati tetapi ketika hendak mau parkir, juru parkir tidak. Disinilah letaknya praktek komunikasi itu diperankan oleh juru parkir. Jangan

hanya menerima biaya parkir tetapi kendaraan yang hendak parkir tidak dipandu.

Jika dicermati pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 0.128 tergolong rendah, artinya komunikasi yang diperankan oleh juru parkir belum optimal ketika melakukan tugasnya. Walaupun sepiantas sepele, hal ini dapat membantu setiap individu untuk mencapai sebuah kesuksesan implementasi kebijakan publik khususnya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Dengan demikian dalam kondisi apapun para juru parkir agar anda selalu dapat melakukan komunikasi secara efektif kepada setiap pemilik kendaraan. Dengan berkomunikasi efektif kita dapat menunjukan kepribadian juru parkir yang berkarakter positif dan membuka diri untuk selalu tumbuh dan berkembang menuju kesuksesan secara bersama-sama khususnya dalam pelayanan jasa umum berupa pelayanan parkir sebagaimana amanah otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan jasa perparkiran, tetapi walaupun demikian komunikasi, pemerintah daerah, tukang parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir tidak ada pengaruh terhadap efektifitas penerimaan pelayanan parkir di Kota Tanjungpinang.

Jika dicermati disposisi merupakan bagian dari implementasi terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menggambarkan bahwa sasaran kebijakan itu yaitu belum optimal dilaksanakan. Tidak optimalnya penerapan

kebijakan tidak terlepas sikap implementor ketika melakukan tagihan kepada pemilik kendaraan bermotor. Sesungguhnya, disposisi (sikap) implementor terhadap isi kebijakan sangat penting dipahami, sebab sebagai apapun isi kebijakan itu dirumuskan, bahkan turunan petunjuk teknis pelaksanaannya, kalau penerapannya tidak sukses maka kebijakan itu akan hampa. Karena itu, semakin baik sikap implementor maka akan semakin efektif suatu implementasi kebijakan itu sendiri, dan *target group* pun sebagai sasaran kebijakan itu yaitu para pemilik kendaraan bermotor akan merasakan manfaat pelayanan parkir itu sendiri. Sebab, dengan kebijakan perparkiran akan mewujudkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor. Jika sikap implementor yaitu para juru parkir tidak empati kepada publik akan membuat pemilik kendaraan bermotor enggan membayar tarif parkir. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan mengatur kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang dimiliki, sikap menjaga kendaraan bermotor agar terhindar dari goresan orang-orang tidak bertanggungjawab. Serta sikap bertanggungjawab manakala ada yang hendak berniat mencuri mobil. Sikap ini harus ditunjukkan agar pemilik kendaraan merasa nyaman memarkirkan mobilnya.

Dengan demikian sikap yang baik parkir perlu ditunjukkan dengan dibekalinya kompetensi para juru parkir serta didukung dengan sarana yang memadai tentu akan membuat efektivitas penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang akan optimal.

Karena itu, menegakkan prinsip-prinsip mutu pelayanan yang berkualitas akan berdampak positif kepada efektivitas penerimaan retribusi parkir. Petugas parkir perlu diberdayakan agar kompetensi mereka semakin lebih baik. Pelatihan pemandu mobil kendaraan ketika hendak parkir dan selesai parkir akan membantu mereka melaksanakan tugasnya.

Jika kompetensi petugas parkir meningkatkan baik akan membuat mereka terbantu melaksanakan tugasnya. Petugas parkir pun akan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian retribusi parkir yang mereka peroleh dari pemilik kendaraan bermotor. Melakukan evaluasi mutu tentu saja akan melahirkan tindakan koreksi terhadap deviasi (penyimpangan), dan dari penyimpangan itu akan melahirkan perbaikan agar kedepan kebijakan itu akan lebih baik. Melakukan evaluasi mutu pelayanan perparkiran tentu saja juru parkir akan semakin memahami tugas diberikan kepadanya yaitu mengutip retribusi parkir di setiap daerah.

Disamping itu, kepala pengawas lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang memiliki ketegasan menerapkan *punishment* dan *rewards*. Sebab, apabila juru parkir melakukan kesalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti kesalahan tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan sementara biaya parkir sudah diterimanya sehingga membuat laporan tidak tercapai penerimaan retribusi parkir maka pimpinan harus melakukan tindakan tegas. Karena itu, jika juru parkir melakukan kesalahan pimpinan harus memberikan hukuman kepada juru parkir.

Demikian juga pimpinan harus melakukan penilaian kepada juru parkir yang berprestasi dalam bentuk insentif terutama juru parkir yang bekerja diatas target yang ditetapkan. Sehingga semboyan PGPS (*Pinter Goblok Penghasilan Sama*), yaitu juru parkir yang rajin, disiplin, dan berprestasi tetap akan mendapatkan gaji yang sama besarnya dengan juru parkir yang malas mengatur tempat parkir kendaraan.

Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan dengan menggunakan alat yang terukur berupa target yang disepakati bersama. Artinya, janganlah pengawasan itu dilakukan jika ada permasalahan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan perparkiran. Sebab pengawasan itu mempunyai hubungan yang erat pelayanan publik sebagaimana dikemukakan Indrawijaya (2000:122) yang mengatakan “terdapat keeratn yang cukup tinggi antara pengawasan dengan pelayanan publik”, tetapi jika tidak ada komitmen pimpinan melakukan tindakan kepada pegawai yang menyimpang dari norma maka pengawasan itu tidak bermakna. Pengawasan yang harus dilakukan ketika terjadi pergantian juru parkir yang tidak memiliki identitas yang jelas. Misalnya adakalanya ditemukan dilapangan juru parkir asli (sesungguhnya) terdaftar di Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang ketika dia malas bekerja kemudian memberikan jaketnya kepada orang lain untuk bekerja, pergantian tanpa sepengetahuan pimpinan tentu akan membuat pelayanan tidak berkualitas.

Salah satu dari dimensi dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu struktur birokrasi yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures*

atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. SOP dalam perparkiran ini tentu para juru parkir harus memandu setiap kendaraan yang hendak parkir dan juru parkir yang hendak menagih biaya parkir harus disertai dengan karcis tanda pembayaran yang distempel resmi dari Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang memiliki pengaruh paling kuat. Artinya, struktur organisasi merupakan juru kunci untuk mensukseskan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum. Karena itu, harus dihindari birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas pengumpulan retribusi parkir tidak efektif.

Adapun struktur birokrasi yang diikuti dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud dan harus diikuti dalam implementasi kebijakan ini yaitu penetapan target retribusi parkir harus melibatkan para juru parkir karena mereka yang bekerja dilapangan untuk mengutip retribusi parkir. Efektifitas penerimaan retribusi parkir memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil), yaitu dengan mengukur keberhasilan juru parkir dalam mencapai tingkatan output (hasil/realisasi) dengan yang direncanakan (ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka juru parkir semakin memiliki efektivitas dalam menagih retribusi parkir.

Pimpinan Dinas Perhubungan ketika melakukan penetapan target perolehan retribusi parkir setiap tahun sebagai tujuan (goal) harus melibatkan para juru parkir. Van Horn mengatakan, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. (Winarno, 2002:113).

Karena itu, keberadaan lembaga Dinas Perhubungan ini tujuannya adalah untuk menarik retribusi parkir dari publik untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik. Semakin besar retribusi parkir yang dihimpun semakin efektif organisasi yang bersangkutan. Karena itu, agar tidak salah menetapkan target harus betul-betul melibatkan semua stakeholders agar mereka memberikan pokok-pokok pikiran untuk menetapkan target yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keterampilan juru parkir serta daya dukung dan daya tampung lokasi atau zona tempat parkir. Jika salah menentukan target retribusi maka akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sebagaimana dikemukakan Griffin (2003:89) mengatakan "jika mereka memilih target yang salah atau jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan menjadi kurang efektif mencapai sasarannya".

Penerapan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan publik itu diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

dan keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintahan. Nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan seperti pembayaran retribusi parkir merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam pembangunan adalah inti dasar dari negara demokrasi. Demikian juga otonomi daerah, hendaknya juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian konsolidasi demokrasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan negara berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi daerah seperti keterlibatan masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir, sebab tanpa dana yang memadai tidak mungkin pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar.

Dimensi sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang agar implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum sukses harus dibarengi dengan ketersediaan sumberdaya. Seperti ketersediaan karcis retribusi, pakaian seragam juru parkir, tanda pengenal, pembuatan papan nama lokasi tarif parkir disetiap zona serta

biayanya. Semuanya itu untuk membangun transparansi dalam pelayanan publik.

Ketersediaan sumber daya yang dilengkapi dengan kompetensi, wewenang dan fasilitas yang ada di setiap zona parkir akan membuat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Sumberdaya manusia yang memadai sangat vital dalam proses pencapaian tujuan lembaga Dinas Perhubungan Darat kota Tanjungpinang. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Rendahnya kualitas juru parkir merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Rendah kualitas implementor dengan kualifikasi pendidikan SD sebanyak 45 orang dari 98 orang tentu akan mempersulit pencapaian target retribusi parkir. Kompetensi dan tingkat pendidikan yang rendah akan mempersulit menginterpretasikan isi kebijakan. Demikian juga ketersediaan juru parkir harus diimbangi pula dengan keterampilan yang memadai seperti tata cara memandu parkir mobil dan tata cara berkomunikasi dengan pemilik kendaraan. Demikian juga juru parkir harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pencapaian target retribusi parkir.

Adanya komitmen kuat dari juru parkir terhadap efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas

Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan cerminan bahwa juru parkir ada atau berupaya mensukseskan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Terinternalisasinya komitmen yang jelas sebelum juru parkir melakukan aktivitas pelayanan kepada pemilik kendaraan merupakan dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa perparkiran .

Atau komitmen yang kuat dari juru parkir akan menjadi pemandu bagi mereka dalam memberikan pelayanan jasa perparkiran untuk mengukur sejauhmana keterkaitan isi kebijakan itu dengan tugas sehari-hari khususnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Dengan demikian bila cermati secara over all yaitu pengaruh seluruh dimensi-dimensi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sangat penting ditindaklanjuti.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hasil perhitungan nilai R^2 determinasi hasil analisis regresi berganda di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi R^2 sebesar 0.444 artinya 44,4% artinya bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang memiliki dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya dapat menerangkan atau menjelaskan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebesar 44.4%.

Sedangkan sisanya sebesar 55.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya insentif, kepemimpinan, pengawasan dan lain-lain. Artinya jika ingin meningkatkan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang maka perlu diperhatikan dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya.

Karena itu, semakin optimal penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum yang diimbangi dengan komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya maka akan semakin baik pula pelayanan jasa perparkiran di kota Tanjungpinang. Adanya keterpengaruhan implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan sejalan dengan pendapat Sebagaimana diuraikan dalam konsep teoritik oleh Saefullah (2007 : 41-42) dan Ndraha (2005:238). Artinya, kebijakan itu tidak bermakna kalau tidak sukses diterapkan dilapangan.

Akhirnya, dari berbagai perhitungan, analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah dikemukakan bahwa ternyata pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota. Hal ini berarti, bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dan didukung data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum terhadap efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Artinya, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang selama ini dapat mewujudkan efektifitas penerimaan retribusi parkir. Hal ini dikarenakan implementasi perda berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan retribusi pelayanan parkir, sedangkan apabila implementasi kebijakan dijabarkan menjadi dimensi/faktor, yang mempengaruhi efektifitas penerimaan parkir yaitu birokrasi, disposisi dan sumber daya.
2. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hasil perhitungan nilai R^2 determinasi hasil analisis regresi di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi

R.square sebesar 0,444 artinya 44.4 % artinya bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan dimensi komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya dapat menerangkan atau menjelaskan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebesar 44.4%. Sedangkan sisanya sebesar 55.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya insentif, kepemimpinan, pengawasan dan lain-lain.

B. Saran

1. Untuk mempermudah penyampaian pesan berupa besarnya tagihan parkir kepada komunikan (penerima pesan) sebaiknya komunikator (juru parkir) menggunakan bahasa lokal sebagai kearifan budaya lokal. Sebab Kota Tanjungpinang sarat dengan budaya lokal.
2. Sikap (disposisi) implementor ketika mengimplementasikan kebijakan publik sebaiknya menunjukkan sikap sebagai pelayanan, bukan menunjukkan kewenangan yang dia miliki sehingga masyarakat dapat menerima sasaran isi kebijakan tersebut atau senang membayar retribusi parkir.
3. Struktur birokrasi yang ada sekarang ini agar implementasi kebijakan sukses diterapkan dan pimpinan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang langsung menyampaikan berapa target yang harus dicapai seorang juru parkir sesuai dengan zona masing-masing.

4. Agar kebijakan sukses diterapkan harus didukung dengan sumberdaya yang memadai seperti sarana dan prasarana, perlengkapan juru parkir, papan pengumuman tarif parkir disetiap sudut jalan serta keuangan dan juru parkir yang memadai.

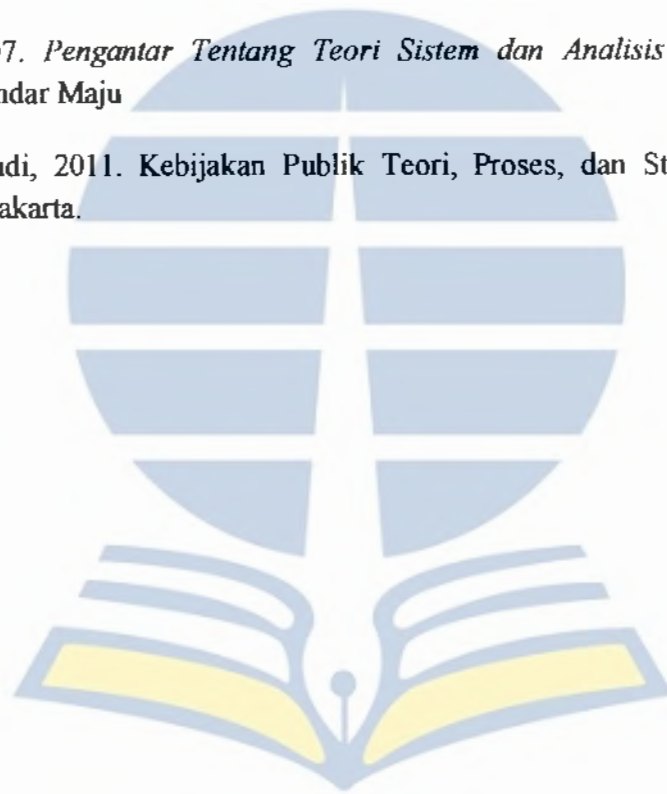


DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Diah. 2014. *The Effect of Policy Implementation of Bureaucracy Reform and The Organizational Development to The Public Service Quality in the Ministry of Home Affairs*. The International Journal of Social Sciences 30 June 2014. Vol. 24 no 1. ISSN 2305-4557
- Andersson and Zbirenko. 2014. *Effect of Organizational Structure, Leadership and Communication on Efficiency and Productivity*. Ume School of Business and Economics Spring. Thesis, 15 Hp
- Agustino Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2017, *Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2017*
- Danim Sudarman .2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Diterjemahkan oleh Amanullah Jakarta : UI Press
- Devas, Nick dan Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Ray Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, diterjemahkan oleh Masri Maris dan Sri Edy Swasono, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Edwards III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C : Congressional Quarterly Press
- Gibson, Ivancevic and Donnelly, 2004. Terjemahan Djoerban Wahid. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku-Struktur-Proses*. Jakarta : Erlangga
- Griffin. Ricky W. 2003. *Manajemen*, Jilid I Alih Bahasa Gina Gania. Jakarta : Erlangga.
- 2004. *Manajemen*. Jilid II. Alih Bahasa Gina Gania. Jakarta : Erlangga.

- Huseini, Martani dan Lubis, S.B. Hari, 2007. *Teori Organisasi*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Universitas Indonesia
- Mansury, 2006. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Penerbit Ind, Hill Co, Jakarta.
- Minggardo.2016. *Articles on Parking Policy*.Disertasi.Delft University of technology. Venezia, Italia.
- Moiseeva, A., Timmermans, H. (2010). *Imputing relevant information from multi-day GPS tracers for retail planning and management using data fusion and context-sensitive learning*. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(3), pp. 189-199
- Nugroho Riant.D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Rosadi Dedi. 1997. *Sistem Perencanaan Terpadu Sebagai Salah satu Determinan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak*. Bandung : PPS UNPAD.
- S. Margono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 105.
- Sidik, Machfud & Soewondo, 1996. *Keuangan Daerah*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Singarimbun M dan Effendi.2009. *Metode Penelitian Survei*.Jakarta: Pustaka LP3ES. hlm. 3.
- Solihin, W., 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2006. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Bumi Aksara
- Still, B., Simmonds, D. (2000). *Parking restraint policy and urban vitality*. Transport Reviews, 20(3), pp. 291-316.
- Subarsono, A.G.,2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cetakan Keempatbelas, Alfabeta, Bandung, 2009.

- Sugiyono.2007. *Statistika Untuk Penelitian*.Bandung: CV. Alfabeta. hlm.260.
- Sukardi.2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*.Jakarta: Bumi Aksara.hlm. 193.
- Tachjan. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Wahab, Solichin A., 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UMM Press, Bandung,
- Winardi 2007. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- Winarno, Budi, 2011. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS, Yogyakarta.



PETUNJUK ANGKET

No Responden:

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RESTRIBUSI JASA
UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**

Atas kesediaan Bapak/Ibu memberikan jawabannya, saya ucapkan terimakasih. Selamat mengerjakan.

1. PETUNJUK PENGISIAN :

- a. Kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan cermat, jujur dan sebenarnya.
- b. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Ada empat alternatif jawaban, yaitu :
 SB = Sangat Baik (4)
 B = Baik (3)
 KB = Kurang Baik (2)
 TB = Tidak Baik (1)

2. KARAKTERISTIK RESPONDEN :

- a. Usia : Tahun
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- c. Pendidikan :
- d. Masa Kerja :
- e. Lokasi Parkir :

Atas kesediaan Bapak/Ibu memberikan jawabannya, saya ucapkan terimakasih. Selamat mengerjakan.

No	Pernyataan Variabel Implementasi Kebijakan Publik (X1)	Alternatif Jawaban			
		SB	B	KB	TB
		4	3	2	1
I.A.	Komunikasi (X1)				
1	Apakah transmisi (media) yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan mudah pahami pemilik kendaraan yang parkir di tepi jalan?				
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu kejelasan informasi atau pesan tentang isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan yang disampaikan oleh pelaksana?				
3	Apakah Bapak/ibu menerima pesan dan melaksanakan isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan secara konsisten?				
4	Bagaimana bahasa yang disampaikan oleh petugas parkir kepada pemilik kendaraan bermotor?				
I.B.	Sumberdaya (X2)				
5	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu ketersediaan staff petugas pelaksana parkir ?				
6	Apakah petugas di tingkat pelaksana dilapangan telah memiliki kompetensi dalam bekerja?				
7	Bagaimana wewenang yang dimiliki pelaksana petugas parkir dalam bekerja?				
8	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu ketersediaan fasilitas sarana-prasarana di tingkat pelaksanaan pengutipan parkir?				
I.C.	Disposisi (X3)				
9	Bagaimana sikap pelaksana kebijakan itu dalam melaksanakan setiap keputusan yang diambil?				
10	Bagaimana kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana petugas parkir?				
11	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan insentif yang diberikan kepada pelaksana petugas parkir?				
12	Apakah pelaksanaan pekerjaan sebagai petugas parkir sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu?				
I.D.	Struktur Birokrasi (X4)				
13	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kejelasan standar dan prosedur pengutipan parkir?				
14	Bagaimana menurut Bapak/Ibu koordinasi antar sesama petugas parkir dilapangan dalam bekerja?				

15	Apakah uraian tugas (tupoksi) pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dimiliki?				
16	Bagaimana kewenangan dan tanggungjawab pelaksana dalam melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing?				
II.A.	Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir				
17	Apakah hasil perolehan retribusi parkir secara riil (nyata) telah sesuai dengan target?				
18	Adakah upaya faktor penghambat perolehan retribusi parkir di lapangan?				
19	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika potensi Retribusi Parkir dikembangkan?				
20	Apakah kejelasan target retribusi parkir harus disepakati terlebih dahulu				
21	Bagaimana kejelasan waktu pencapaian target yang harus dipenuhi Bapak/Ibu.				
22	Apakah tersedia fasilitas mencapai target retribusi parkir di lapangan?				
23	Sebelum pekerjaan pengutipan retribusi dilakukan apakah perlu ada kesepakatan terhadap target yang hendak dicapai?				



No	Sub Variabel Komunkilast	Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval	Sub Variabel Disposisi	Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval	
1	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	2	1.900	2	1.000	2	1.000	2	1.000	
2	3	1.973	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	4	3.964	
3	2	1.000	4	4.045	4	3.586	3	2.480	2	1.000	2	1.000	2	1.000	3	2.415	
4	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
5	4	3.677	3	2.387	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
6	4	3.677	4	4.045	2	1.000	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
7	3	1.973	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
8	4	3.677	3	2.387	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
9	4	3.677	3	2.387	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
10	3	1.973	3	2.387	3	1.976	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	4	3.964	
11	4	3.677	3	2.387	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
12	3	1.973	3	2.387	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
13	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
14	3	1.973	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
15	3	1.973	3	2.387	3	1.976	3	2.480	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
16	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
17	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
18	4	3.677	3	2.387	4	3.586	3	2.480	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
19	4	3.677	3	2.387	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
20	4	3.677	3	2.387	3	1.976	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
21	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
22	4	3.677	4	4.045	3	1.976	3	2.480	2	1.000	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
23	3	1.973	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	2	1.000	2	1.000	2	1.000	
24	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
25	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
26	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
27	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
28	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
29	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	4	3.964	
30	3	1.973	2	1.000	2	1.000	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
31	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
32	3	1.973	3	2.387	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
33	4	3.677	3	2.387	3	1.976	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
34	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
35	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
36	4	3.677	4	4.045	3	1.976	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
37	4	3.677	3	2.387	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
38	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
39	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	3	2.049	4	3.964	
40	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
41	4	3.677	3	2.387	3	1.976	4	4.104	4	3.772	4	3.901	3	2.049	3	2.415	
42	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
43	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
44	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
45	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
46	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
47	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
48	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
49	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
50	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
51	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
52	4	3.677	4	4.045	3	1.976	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
53	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
54	3	1.973	3	2.387	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
55	4	3.677	3	2.387	3	1.976	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
56	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
57	4	3.677	3	2.387	3	1.976	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415	
58	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	3	2.398	3	2.049	4	3.964	
59	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
60	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	3	2.049	3	2.415	
61	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
62	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
63	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
64	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
65	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
66	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	4	3.631	4	3.964	
67	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
68	4	3.677	4	4.045	3	1.976	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415	
69	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
70	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
71	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
72	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	2	1.000	4	3.901	4	3.631	3	2.415	
73	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
74	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
75	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964	
76	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964	

77	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	3	2.415
78	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964
79	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	4	3.964
80	2	1.000	3	2.387	2	1.000	2	1.000	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964
81	3	1.973	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	4	3.631	3	2.415
82	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
83	4	3.677	3	2.387	3	1.976	3	2.480	3	2.295	4	3.901	4	3.631	4	3.964
84	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	3	2.295	3	2.398	3	2.049	3	2.415
85	4	3.677	3	2.387	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
86	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
87	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
88	4	3.677	3	2.387	3	1.976	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	3	2.415
89	4	3.677	4	4.045	3	1.976	4	4.104	4	3.772	4	3.901	3	2.049	4	3.964
90	4	3.677	4	4.045	4	3.586	3	2.480	4	3.772	4	3.901	4	3.631	3	2.415
91	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
92	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
93	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
94	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	3	2.398	4	3.631	4	3.964
95	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
96	3	1.973	4	4.045	3	1.976	3	2.480	3	2.295	3	2.398	4	3.631	3	2.415
97	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964
98	4	3.677	4	4.045	4	3.586	4	4.104	4	3.772	4	3.901	4	3.631	4	3.964



No	Sub Variabel Struktur birokrasi	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Sub Variabel Sumberdaya	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Successive Interval	Implementasi
1	4	2.625	3	2.338	3	1.000	3	2.283	4	4.164	3	2.347	4	3.607	3	2.470	40.245
2	3	1.000	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	49.992
3	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	43.674
4	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	4	4.164	4	3.856	3	2.096	4	4.009	49.877
5	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.167
6	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	52.246
7	3	1.000	3	2.338	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	49.908
8	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	51.491
9	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	49.776
10	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	4	3.856	3	2.096	3	2.470	45.267
11	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	53.176
12	3	1.000	3	2.338	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	43.612
13	4	2.625	2	1.000	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	48.926
14	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	54.612
15	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	3	2.470	49.838
16	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	1.009	54.844
17	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	51.725
18	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	2	1.000	2	1.000	2	1.000	38.364
19	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	2	1.000	2	1.000	2	1.000	44.475
20	4	2.625	3	2.338	3	1.000	3	2.283	2	1.000	2	1.000	2	1.000	3	2.470	41.128
21	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	3	2.096	3	2.470	51.702
22	4	2.625	3	2.338	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	48.708
23	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	4	3.607	4	4.009	44.664
24	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	54.750
25	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	3	2.564	3	2.347	4	3.607	3	2.470	48.289
26	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	3	2.096	4	4.009	53.353
27	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	4	3.607	3	2.470	51.750
28	3	1.000	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	51.562
29	3	1.000	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	3	2.096	3	2.470	48.591
30	3	1.000	4	3.904	3	1.000	3	2.283	3	2.564	3	2.347	3	2.096	4	4.009	39.422
31	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	3	2.470	51.761
32	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	43.417
33	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	4	4.009	53.105
34	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	3	2.096	4	4.009	50.261
35	3	1.000	3	2.338	3	1.000	4	3.984	4	4.164	3	2.347	3	2.096	3	2.470	50.079
36	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	54.706
37	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	40.445
38	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.773
39	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.364
40	3	1.000	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	3	2.096	4	4.009	51.614
41	4	2.625	2	1.000	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	2	1.000	4	4.009	47.540
42	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	53.214
43	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.901
44	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	4	3.607	4	4.009	48.605
45	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	3	2.096	4	4.009	56.372
46	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	53.212
47	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	3	2.470	53.309
48	4	2.625	3	2.338	3	1.000	3	2.283	4	4.164	4	3.856	3	2.096	3	2.470	51.511
49	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	48.579
50	4	2.625	3	2.338	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	3	2.096	3	2.470	51.613
51	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.825
52	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	3	2.096	4	4.009	53.286
53	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	4	4.164	3	2.347	3	2.096	3	2.470	40.642
54	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.088
55	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.558
56	3	1.000	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	3	2.347	4	3.607	3	2.470	46.880
57	3	1.000	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	3	2.470	46.937
58	3	1.000	4	3.904	3	1.000	3	2.283	4	4.164	3	2.347	4	3.607	3	2.470	46.145
59	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
60	4	2.625	4	3.904	4	2.621	3	2.283	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.617
61	4	2.625	3	2.338	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	3	2.096	4	4.009	54.895
62	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.901
63	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	53.338
64	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
65	4	2.625	4	3.904	4	2.621	3	2.283	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.271
66	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.469
67	4	2.625	3	2.338	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	3	2.096	3	2.470	49.988
68	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	46.969
69	3	1.000	3	2.338	3	1.000	4	3.984	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	46.855
70	3	1.000	4	3.904	4	2.621	2	1.000	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	53.332
71	3	1.000	4	3													

77	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	3	2.470	53.238
78	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	54.813
79	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.887
80	3	1.000	3	2.338	3	1.000	3	2.283	3	2.564	3	2.347	3	2.096	3	2.470	35.251
81	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	50.083
82	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.825
83	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	49.947
84	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	53.338
85	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.792
86	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
87	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
88	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.633
89	4	2.625	4	3.904	4	2.621	3	2.283	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	54.556
90	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	56.276
91	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
92	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
93	4	2.625	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	59.449
94	4	2.625	4	3.904	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	4	3.607	3	2.470	53.187
95	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	3	2.347	4	3.607	4	4.009	56.316
96	4	2.625	3	2.338	3	1.000	4	3.984	3	2.564	4	3.856	3	2.096	3	2.470	42.146
97	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	3	2.564	3	2.347	4	3.607	4	4.009	54.716
98	3	1.000	4	3.904	4	2.621	4	3.984	4	4.164	4	3.856	4	3.607	4	4.009	57.824



Linha	Efektivitas Retribusi	Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval		Successive Interval	
	1	4	2	3	3	4	4	3	5	3	6	4	7	4			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	3	2.470	3	1.992	4	4.179	4	2.720	21.700			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	3	1.992	3	2.584	4	2.720	23.215			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.802			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	24.755			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	3	1.000	23.089			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	4	4.269	3	2.159	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	20.112			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.534			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	20.135			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	2	1.000	3	2.584	4	2.720	20.652			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	4	2.720	23.239			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.811			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	24.755			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	3	1.992	3	2.584	3	1.000	15.280			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	3	1.000	18.368			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	23.222			
2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	3	1.000	7.000			
3	2.377	4	4.269	3	2.159	3	2.470	3	1.992	4	4.179	4	2.720	20.166			
2	1.000	3	2.698	2	1.000	2	1.000	2	1.000	3	2.584	3	1.000	10.282			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	21.628			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	3	1.000	18.368			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	20.080			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	3	1.000	18.368			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.534			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	3	2.470	3	1.992	4	4.179	4	2.720	21.723			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	21.674			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.811			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	3	1.992	3	2.584	3	1.000	15.280			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.793			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.802			
4	3.934	3	2.698	3	2.159	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	21.692			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	3	1.992	3	2.584	3	1.000	15.280			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	3	2.698	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	23.231			
4	3.934	4	4.269	2	1.000	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	22.049			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.502			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.802			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	3	1.000	19.939			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.811			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	3	2.470	3	1.992	4	4.179	4	2.720	21.723			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	23.254			
3	2.377	4	4.269	3	2.159	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	20.112			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.802			
4	3.934	3	2.698	3	2.159	3	2.470	3	1.992	3	2.584	3	1.000	16.837			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	3	1.000	18.368			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	21.645			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	3	2.470	3	1.992	4	4.179	4	2.720	21.700			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	3	1.992	3	2.584	4	2.720	23.215			
4	3.934	4	4.269	3	2.159	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.802			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	24.755			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	3	1.000	23.089			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	4	4.269	3	2.159	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	20.112			
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.534			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	20.135			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	2	1.000	3	2.584	4	2.720	20.652			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	4	2.720	23.239			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.811			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	21.645			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	3	2.698	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	4	2.720	21.682			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	23.216			
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779			
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350			
3	2.377	3	2.698	3	2.159	3	2.470	3	1.992	3	2.584	3	1.000	15.280			

4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	4	2.720	24.755
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	3	1.992	4	4.179	4	2.720	24.810
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	3	2.584	3	1.000	23.035
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	3	1.000	24.629
3	2.377	4	4.269	4	3.706	3	2.470	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.534
4	3.934	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	24.779
3	2.377	4	4.269	3	2.159	3	2.470	4	3.532	3	2.584	4	2.720	20.112
3	2.377	3	2.698	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	3	1.000	21.502
4	3.934	4	4.269	4	3.706	4	4.009	4	3.532	4	4.179	4	2.720	26.350



RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00008
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Notes		
Output Created	08-OCT-2017 02:48:53	
Comments		
Input	Data	E:\campur campur\efektifitas validasi.sav
	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	30
	File	
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00008 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.29

[DataSet5] E:\campur campur\efektifitas validasi.sav

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3.0000	.58722	30
VAR00002	2.9667	.31984	30
VAR00003	3.3333	.75810	30
VAR00004	3.2667	.73968	30
VAR00005	3.5000	.77682	30
VAR00006	3.4000	.62146	30
VAR00008	3.2333	.62606	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	19.7000	8.079	.764	.813
VAR00002	19.7333	9.857	.506	.853
VAR00003	19.3667	7.413	.724	.815
VAR00004	19.4333	7.357	.765	.808
VAR00005	19.2000	7.062	.802	.801
VAR00006	19.3000	8.631	.536	.843
VAR00008	19.4667	9.430	.400	.874

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.7000	10.976	3.31298	7

DATASET ACTIVATE DataSet3.

RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Notes	
Output Created	08-OCT-2017 02:51:19
Comments	
Data	E:\campur campur\implementasi
Active Dataset	validitas.sav
Filter	DataSet3
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data	<none>
File	30
Matrix Input	
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Cases Used	

Syntax	RELIABILITY	
	/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.03

[DataSet3] E:\campur campur\implementasi validitas.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.956	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3.0000	.52523	30
VAR00002	3.0667	.44978	30
VAR00003	3.3333	.71116	30
VAR00004	3.2000	.66436	30
VAR00005	3.2000	.71438	30
VAR00006	3.3667	.71840	30
VAR00007	3.2000	.71438	30
VAR00008	3.2333	.81720	30
VAR00009	3.1333	.97320	30
VAR00010	3.3667	.71840	30
VAR00011	3.2000	.71438	30
VAR00012	3.3333	.80230	30
VAR00013	3.1333	.68145	30
VAR00014	3.2000	.71438	30
VAR00015	3.2333	.81720	30
VAR00016	3.2000	.71438	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	48.4000	74.317	.716	.954
VAR00002	48.3333	77.057	.483	.957
VAR00003	48.0667	70.547	.839	.952
VAR00004	48.2000	71.200	.841	.952
VAR00005	48.2000	70.855	.807	.952
VAR00006	48.0333	71.344	.759	.953
VAR00007	48.2000	72.097	.698	.954
VAR00008	48.1667	70.282	.739	.954
VAR00009	48.2667	67.513	.789	.953
VAR00010	48.0333	71.344	.759	.953
VAR00011	48.2000	70.855	.807	.952
VAR00012	48.0667	70.547	.733	.954
VAR00013	48.2667	73.513	.607	.956
VAR00014	48.2000	70.855	.807	.952
VAR00015	48.1667	70.282	.739	.954
VAR00016	48.2000	70.855	.807	.952

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
51.4000	81.076	9.00421	16

DATASET ACTIVATE DataSet1.

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT VAR00005

/METHOD=ENTER VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004

/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID)

/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)

/SAVE RESID ZRESID.

Regression

Notes

Output Created	08-OCT-2017 02:58:33
Comments	
Data	E:\campur campur\hasil.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data	98
File	
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	
Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT VAR00005 /METHOD=ENTER VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /SAVE RESID ZRESID.	
Resources	Processor Time	00:00:02.36
	Elapsed Time	00:00:14.56
	Memory Required	4112 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	632 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual
	ZRE_1	Standardized Residual

[DataSet1] E:\campur campur\hasil.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	sumber daya, disposisi, komunikasi, birokrasi ^b		Enter

a. Dependent Variable: efektifitas

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.776 ^a	.601	.584	1.27546	1.995

a. Predictors: (Constant), sumber daya, disposisi, komunikasi, birokrasi

b. Dependent Variable: efektifitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.269	4	57.067	35.079	.000 ^b
	Residual	151.292	93	1.627		
	Total	379.561	97			

a. Dependent Variable: efektifitas

b. Predictors: (Constant), sumber daya, disposisi, komunikasi, birokrasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	3.443	2.267		1.518	.132	
	komunikasi	.059	.106	.038	.553	.582	.910
	disposisi	.178	.078	.149	2.280	.025	.997
	birokrasi	.959	.123	.586	7.830	.000	.765
	sumber daya	.318	.094	.257	3.371	.001	.736

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		VIF	
1	(Constant)		
	komunikasi		1.099
	disposisi		1.003
	birokrasi		1.307
	sumber daya		1.358

a. Dependent Variable: efektifitas

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	komunikasi	disposisi	birokrasi
1	1	4.973	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.013	19.500	.00	.01	.66	.02
	3	.007	27.240	.03	.49	.14	.01
	4	.005	32.624	.04	.22	.05	.62
	5	.002	45.666	.94	.28	.14	.36

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		sumber daya	
1	1		.00
	2		.16
	3		.45
	4		.37
	5		.02

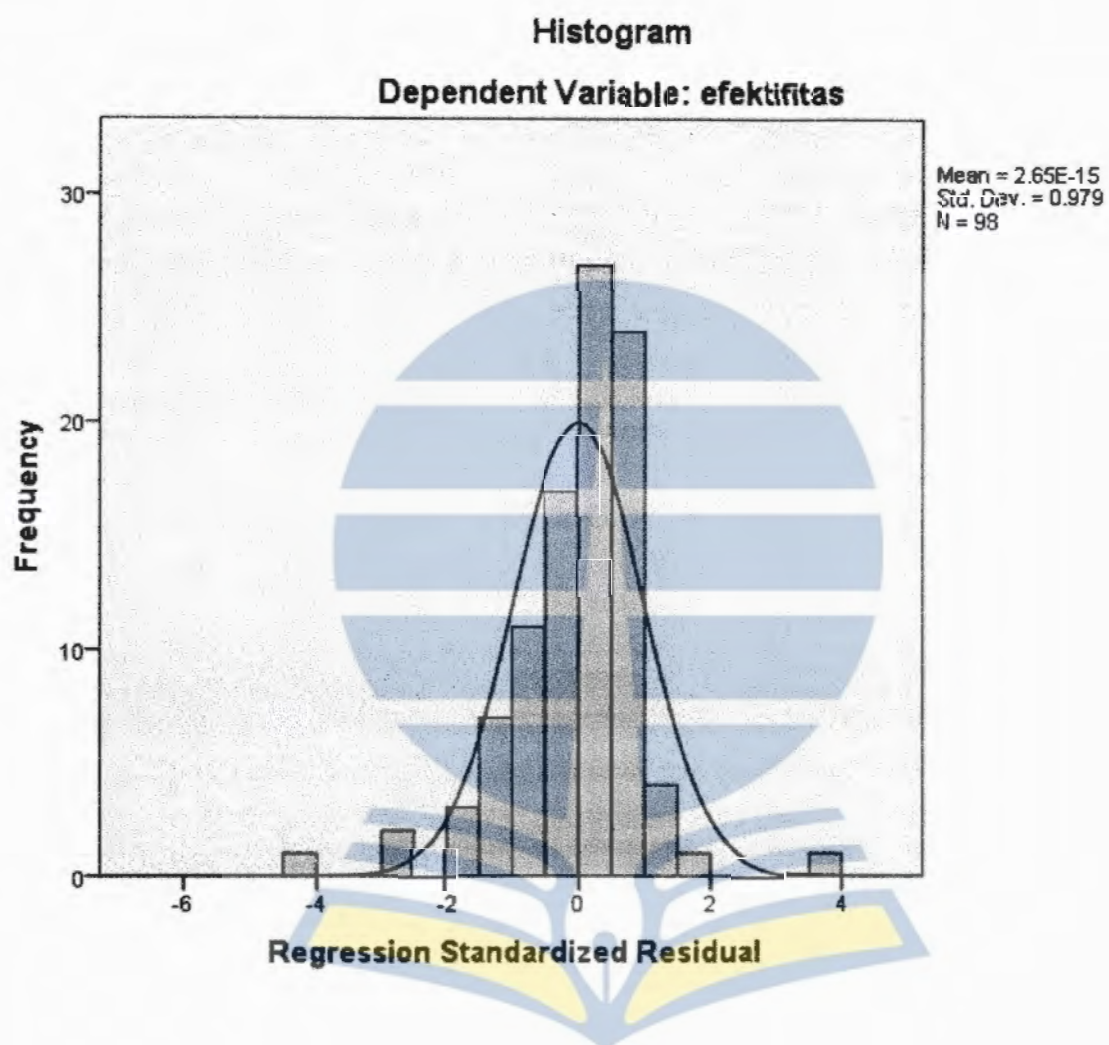
a. Dependent Variable: efektifitas

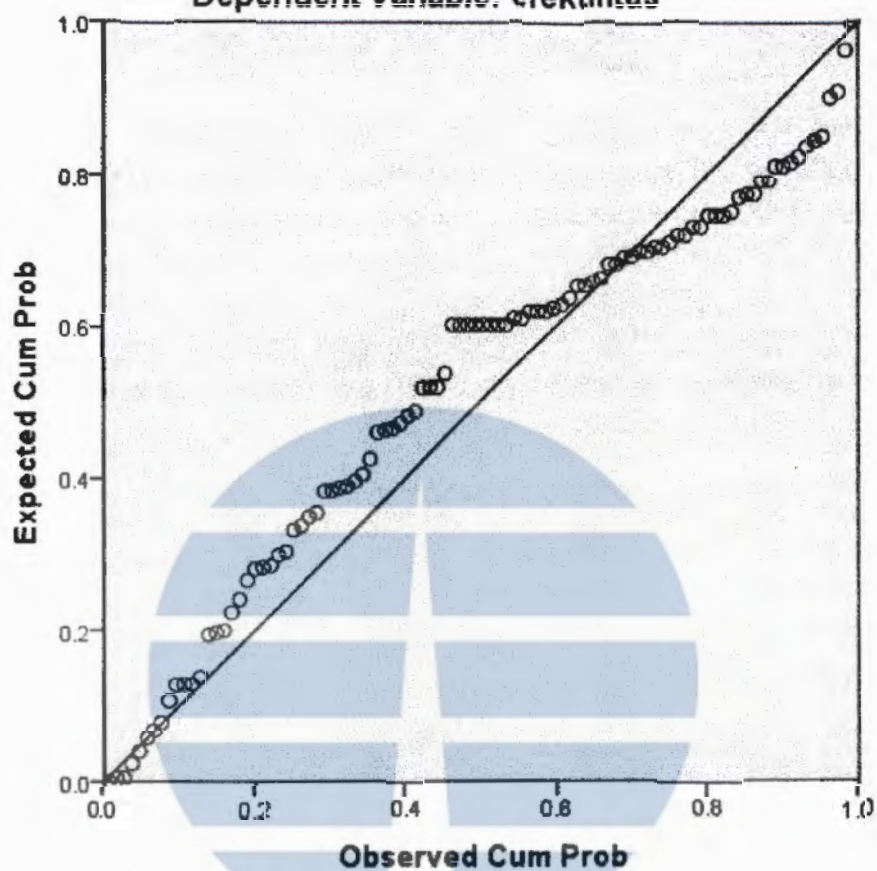
Residuals Statistics^a

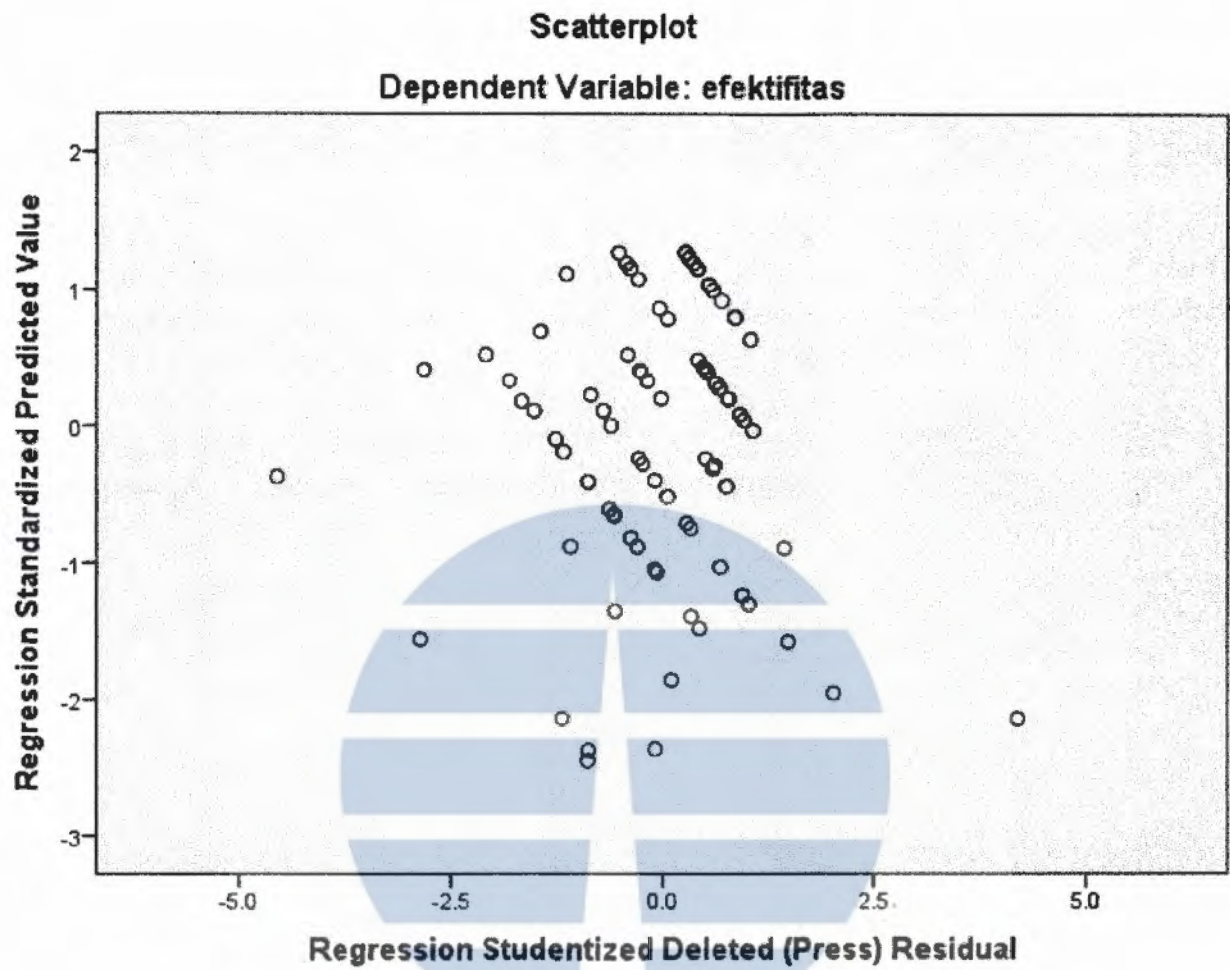
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	21.9716	27.6722	25.7245	1.53404	98
Std. Predicted Value	-2.446	1.270	.000	1.000	98
Standard Error of Predicted Value	.140	.661	.268	.106	98
Adjusted Predicted Value	21.6742	27.6942	25.7191	1.55641	98
Residual	-5.16109	4.55165	.00000	1.24889	98
Std. Residual	-4.046	3.569	.000	.979	98
Stud. Residual	-4.134	3.860	.002	1.020	98
Deleted Residual	-5.38711	5.32582	.00543	1.35698	98
Stud. Deleted Residual	-4.551	4.190	-.002	1.059	98
Mahal. Distance	.182	25.073	3.959	4.601	98
Cook's Distance	.000	.507	.018	.060	98
Centered Leverage Value	.002	.258	.041	.047	98

a. Dependent Variable: efektifitas

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: efektifitas**




```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT efektifitas
/METHOD=ENTER implementasi
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/SAVE RESID.

```

Regression

Notes		
Output Created		14-OCT-2017 18:38:00
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	98
Missing Value Handling	File	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT efektifitas /METHOD=ENTER implementasi /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /SAVE RESID.	
Resources	Processor Time	00:00:00.78
	Elapsed Time	00:00:00.70
	Memory Required	2400 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	680 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi Kebijakan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.444	2.67854	1.806

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

b. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	561.973	1	561.973	78.328	.000 ^b
	Residual	688.761	96	7.175		
	Total	1250.733	97			

a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

b. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.134	2.615		-.051	.959
	Implementasi Kebijakan	.445	.050	.670	8.850	.000

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Implementasi Kebijakan	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Implementasi Kebijakan
1	1	1.995	1.000	.00	.00
	2	.005	19.276	1.00	1.00

a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

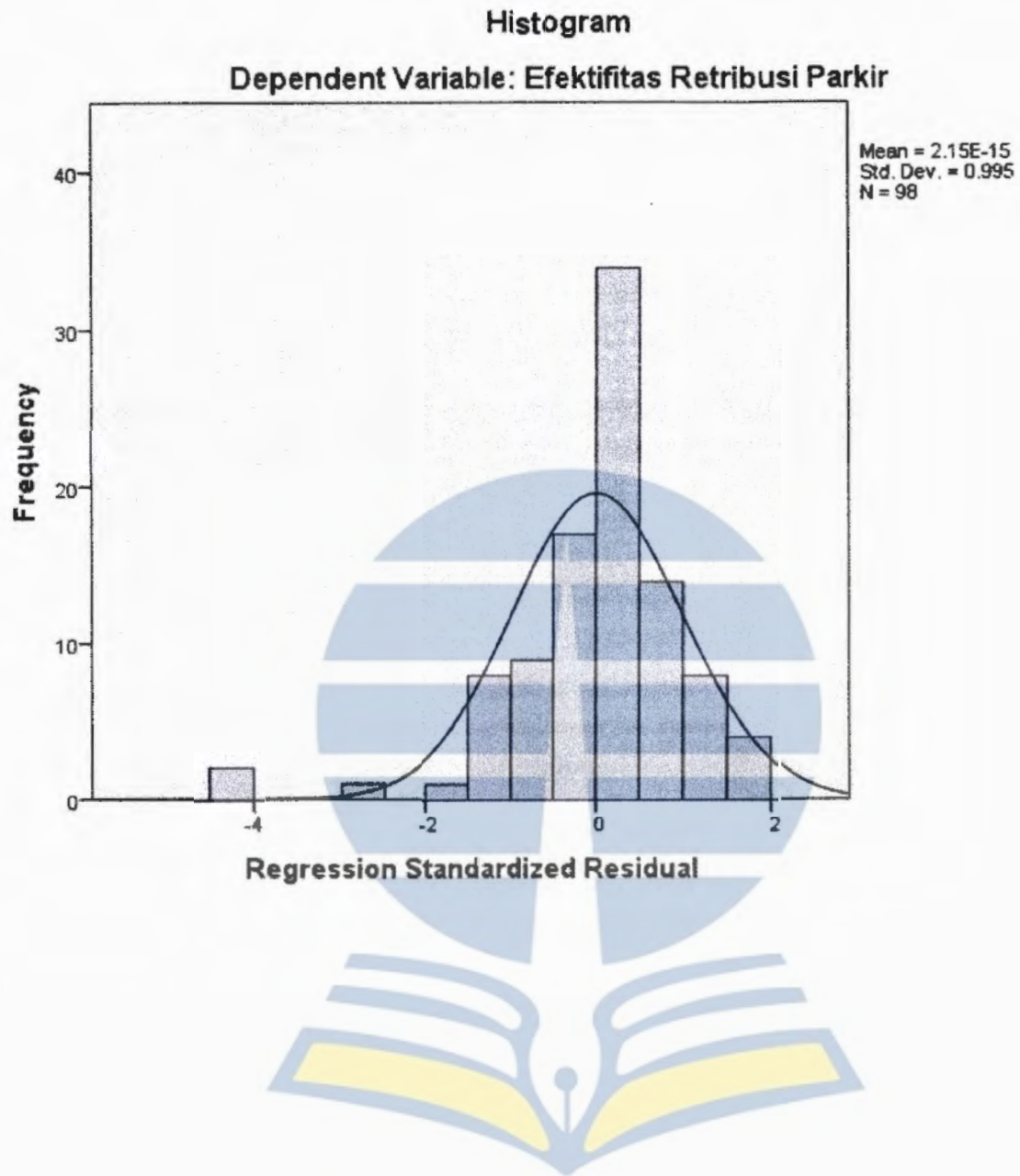
Residuals Statistics^a

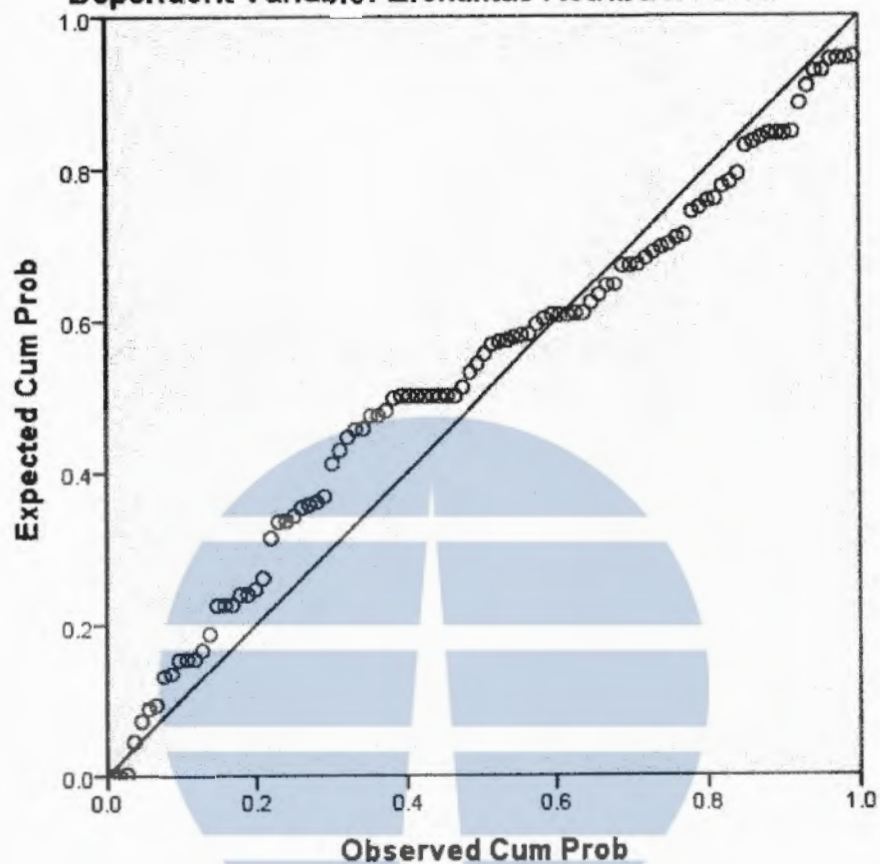
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15.5637	26.3393	22.8844	2.40698	98
Std. Predicted Value	-3.041	1.435	.000	1.000	98
Standard Error of Predicted Value	.271	.870	.365	.115	98
Adjusted Predicted Value	15.5972	26.3948	22.8841	2.40895	98
Residual	-11.27423	4.31818	.00000	2.66470	98
Std. Residual	-4.209	1.612	.000	.995	98
Stud. Residual	-4.282	1.641	.000	1.007	98
Deleted Residual	-11.76396	4.54038	.00030	2.73014	98
Stud. Deleted Residual	-4.735	1.655	-.010	1.052	98
Mahal. Distance	.000	9.250	.990	1.489	98
Cook's Distance	.000	.478	.012	.051	98
Centered Leverage Value	.000	.095	.010	.015	98

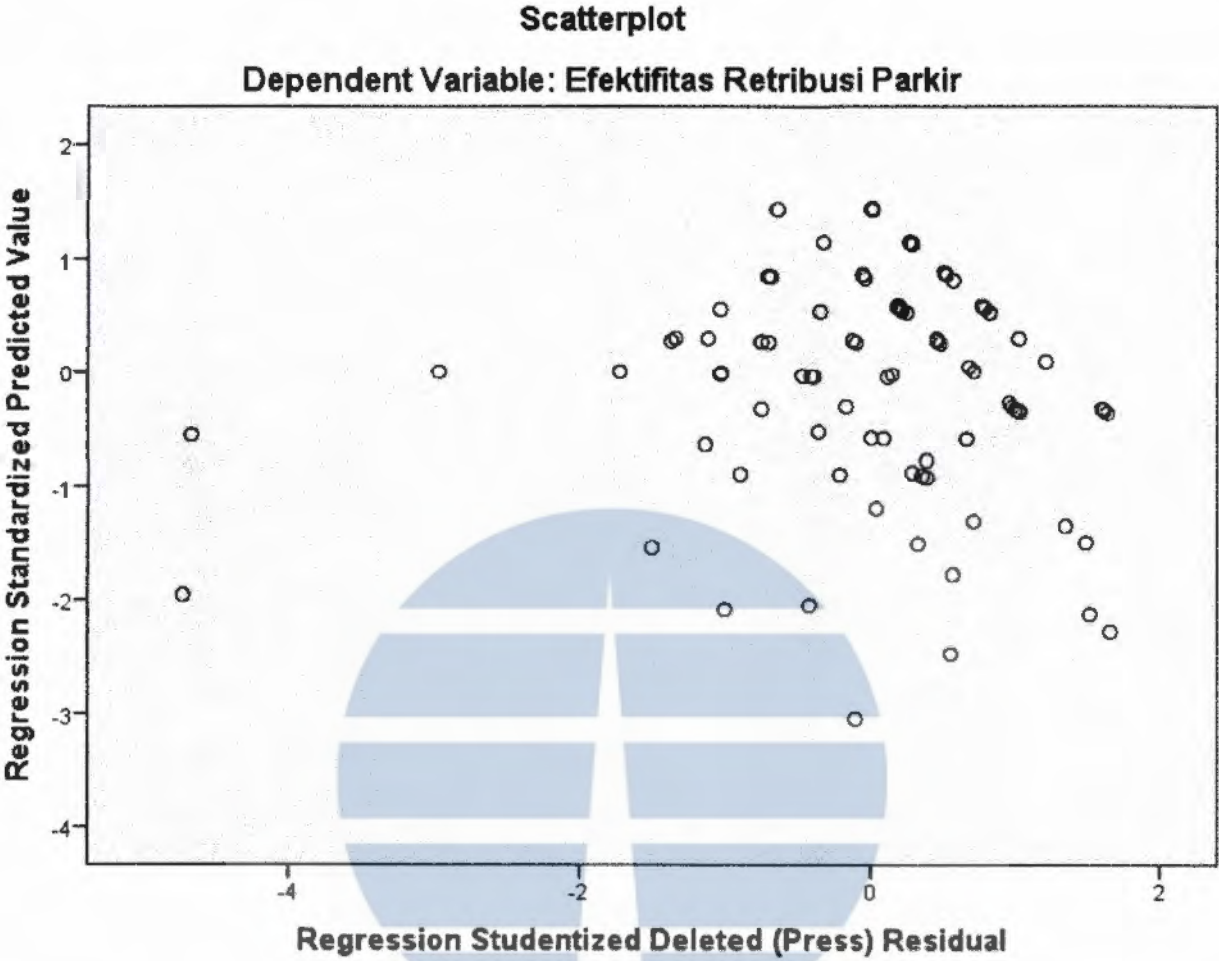
a. Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir

Charts





Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: Efektifitas Retribusi Parkir**



NPART TESTS
/K-S (NORMAL) =RES_1
/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

Notes		
Output Created	14-OCT-2017 18:38:31	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>

	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	98
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax		NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00
	Number of Cases Allowed ^a	196608

a. Based on availability of workspace memory.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66469964
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.069
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.